

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LELANG ONLINE  
BERDASARKAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**NOVITA WAHYU EKAPUTRI**

**0610110147**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LELANG ONLINE BERDASARKAN  
PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh :

**NOVITA WAHYU EKAPUTRI**

NIM : 0610110147

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

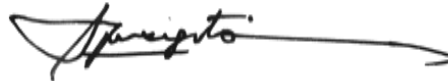
Pembimbing Utama,



Indrati, SH., MS.

NIP. 19480222 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,



Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.

NIP. 19600423 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji,



Dr. Bambang Winarno, SH., MS.

NIP. 19530121 197903 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Siti Hamidah, SH., MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan,



Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala sembah dan puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT atas semua rahmat, nikmat, bimbingan, dan petunjuk yang selalu diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA LELANG ONLINE BERDASARKAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Brawijaya Malang. Penulis dengan segala keterbatasannya sebagai manusia menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima penulis dengan senang hati.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Indrati, SH.MS. selaku dosen pembimbing utama serta Bapak Sentot P. Sigito, SH.M.Hum. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa penghargaan, penghormatan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

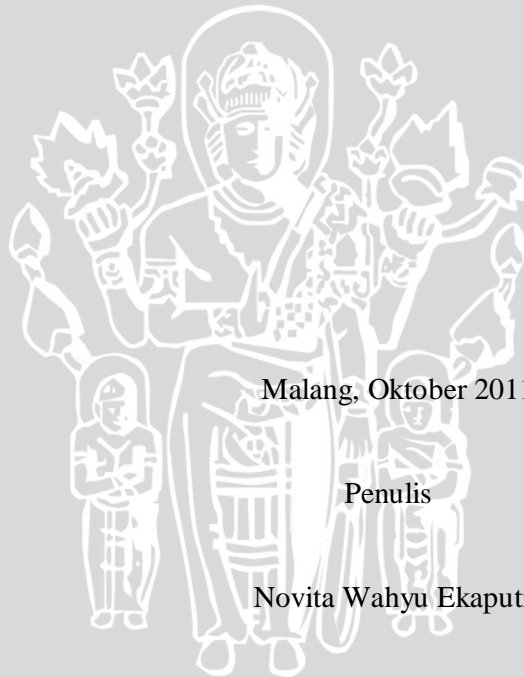
1. Bapak DR. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberi masukan dan dukungan selama ini.
3. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu hukum yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan juga untuk seluruh staf karyawan FH-UB.
4. Mama, Bapak dan Adek tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.



5. Mbah Uti, Tante Ros, Om Prima, Tante Na, Christa, Tante Danny, Om Yoyok, Selfi, dan Nyak yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Yunchan, Putri, Mega, Made, Kazu, Mas Sandi, Mas Sigit yang selalu memberikan semangat dan berbagi wawasan kepada penulis.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang, Oktober 2011

Penulis

Novita Wahyu Ekaputri

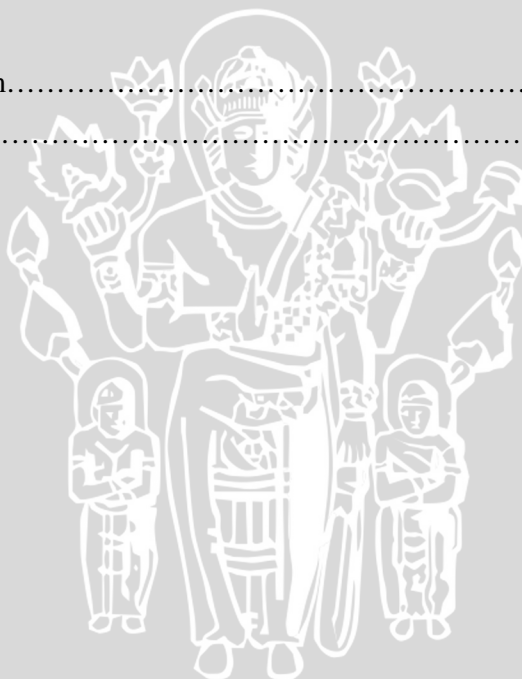
## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Daftar Gambar</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Kajian Umum Tentang Perjanjian</b>	
A.1 Pengertian Perjanjian.....	12
A.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	13
A.3 Lahirnya Perjanjian.....	18
A.4 Syarat Sah Perjanjian.....	18
<b>B. Kajian Umum Tentang Lelang</b>	
B.1 Pengertian Lelang.....	20
B.2 Dasar Hukum Lelang.....	23
B.3 Perbedaan Antara Lelang Konvensional Dengan Lelang Online.....	27
<b>C. Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum</b> .....	28
<b>D. Kajian Umum Tentang E-Commerce</b> .....	30
<b>E. Kajian Umum Tentang Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11         Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik</b> .....	32
<b>G. Kajian Umum Tentang Penafsiran Hukum</b> .....	35
<b>H. Kajian Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum</b> .....	40

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Keberadaan Situs Lelang Online ( <i>Online Auction</i> ).....	50
	B. Sistem Pada Lelang Online.....	52
	C. Perhitungan Harga Dalam Lelang Online.....	56
	D. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online	
	Akibat Adanya Manipulasi Data Dalam Aturan Pasal 35 UU	
	ITE.....	57
	E. Peraturan Tetap Dalam Upaya Penyelesaian Kasus	
	Manipulasi Data Peserta Lelang Online Ketika	
	Pasal 35 UU ITE Tidak Bisa Memberikan Perlindungan	
	Hukum.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN





## DAFTAR TABEL

Tabel :

1.1 Perbedaan lelang konvensional dengan lelang online.....	27
1.2 Perkembangan jumlah pelanggan dan pemakai internet.....	52

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR GAMBAR

Gambar :

1.1 Pengumuman lelang secara online.....	54
1.2 Proses lelang secara online.....	55





## ABSTRAKSI

Ekaputri, Novita. Hukum Perdata Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oktober 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Indrati, SH.MS., Sentot P. Sigit, SH.M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi peserta lelang online berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya keluhan dari para peserta lelang online yang merasa dalam proses lelang tersebut telah terjadi manipulasi data. Sehingga dengan adanya manipulasi data tersebut banyak dari peserta lelang online yang merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang disajikan yaitu : (1) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi peserta lelang online akibat adanya manipulasi data sesuai dengan aturan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (2) bagaimana peraturan tetap dalam upaya penyelesaian kasus manipulasi data peserta lelang online apabila Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak bisa memberikan perlindungan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, kemudian seluruh bahan hukum dianalisa menggunakan metode *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, (1) Bentuk perlindungan hukum bagi peserta lelang online dalam Pasal 35 UU ITE mengenai rumusan tentang perbuatan yang dilarang sudah cukup jelas. Akan tetapi, kurang dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak dapat menjangkau kasus yang terjadi. (2) Masih terjadi kekosongan hukum pada peraturan tetap, mengenai upaya penyelesaian kasus manipulasi data bagi peserta lelang online. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan bagi peserta lelang online selaku pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta meminta ganti rugi.

Dengan adanya hal-hal diatas maka Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus secepatnya membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta meningkatkan pengawasan terhadap *e-commerce* khususnya lelang online sehingga, dapat memberikan rasa aman bagi konsumen yang melakukan transaksi secara online. Selain itu masih diperlukan penyempurnaan dalam UU ITE agar tidak ada peluang bagi para pengusaha nakal yang ingin mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya manipulasi data. Selain itu, praktisi lelang seharusnya saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan transaksi *e-commerce*, khususnya lelang, sehingga proses lelang saling menguntungkan dan tidak sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perangkat komputer untuk berbagai keperluan ikut serta mendukung penggunaan internet untuk berbagai keperluan. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga memunculkan beragam jasa-jasa fasilitas telekomunikasi serta semakin canggihnya produk-produk yang ditawarkan. Ditengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dan semakin populernya internet seakan membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara beserta peraturan dan tatanan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Komputer yang berfungsi sebagai alat bantu manusia didukung dengan perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan publik (*publik network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Lahirnya internet membawa dampak yang besar bagi dunia bisnis dan perdagangan. Lahirnya internet disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi. Selain hal tersebut adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, mudah dan praktis juga mempengaruhi perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi saat ini, cukup dengan mengetikkan alamat situs yang diinginkan atau mencari menggunakan mesin

---

<sup>1</sup> Azriadi Prana, Gede Artha, 2001, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Medikom Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 78.



pencari seperti google ataupun yahoo, maka dalam beberapa detik saja kita dapat memperoleh dan menemukan informasi yang diinginkan.

Dalam kurun waktu tahun 90-an hingga 2009, teknologi internet terus berkembang, masyarakat pun mulai menggunakan teknologi internet sebagai lahan bisnis atau *e-commerce* (perdagangan elektronik), baik secara pribadi maupun institusi bahkan sekadar untuk mengirim *e-mail* (surat elektronik). Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* dimana pelaku usaha menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional.

Fakta selama ini menunjukkan bahwa banyak manajemen perusahaan yang belum menyadari pertanggungjawaban yang dibebankan pada perusahaan, dengan adanya akses melalui internet ini. Karena kebanyakan dari manajemen perusahaan hanya mengacu pada keuntungan yang didapatkan melalui kemudahan akses internet dan tidak sampai memikirkan adanya aspek hukum yang baru yang berhubungan dengan internet yang akan mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Di samping keuntungan yang dijanjikan media internet, perusahaan juga harus berhati-hati dengan pemberian akses internet kepada para pegawainya agar tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Lelang pada dasarnya merupakan institusi pasar yang khas karena lelang mampu menciptakan kesepakatan yang paling menguntungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli melalui suatu proses penjualan yang aman, cepat, dan transparan dan dipimpin oleh Pejabat Lelang. Lelang merupakan sarana ekonomi yang sejak lama ada dan berkembang dalam masyarakat. Sejak jaman Yunani



sekitar 450 tahun SM lelang sangat populer dan dikenal untuk menjual karya seni, tembakau serta kuda. Sedangkan pada jaman Romawi lelang digunakan untuk menjual harta jarahan perang, termasuk para budak.

Dalam perkembangan saat ini, cara lelang juga dipakai dalam penjualan berbagai macam barang. Di negara-negara maju, penjualan dengan cara lelang sudah menjadi salah satu alternatif penjualan barang yang efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional.

Lelang mencerminkan bentuk penjualan secara demokratis, karena penjualan secara lelang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan bersaing secara sehat guna memperoleh barang yang diinginkan, dalam lelang peserta lelang mempunyai kedudukan yang sama. Jika lelang berfungsi secara optimal, maka harga yang terbentuk dalam lelang akan menjadi harga wajar yang selanjutnya menjadi standart dalam sektor-sektor tertentu.

Penjualan secara umum (lelang) masuk dalam perundang-undangan Indonesia sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement (Peraturan Lelang, Stb 1908 No. 189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang, Stb 1908 No.190). Kedua peraturan mengenai lelang tersebut masih berlaku sampai saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia.

Adapun situs yang khusus menawarkan barang untuk dijual secara lelang antara lain : [www.e-bay.com](http://www.e-bay.com), [www.swinde.com](http://www.swinde.com), [www.lelangonline.me](http://www.lelangonline.me), [www.munye.com](http://www.munye.com), [www.monofri.com](http://www.monofri.com), [www.lelangholic.com](http://www.lelangholic.com) dan masih banyak situs lelang yang lainnya. Saat ini kebanyakan dari para pengelola situs lelang

menyediakan barang-barang bergerak seperti : motor, telepon genggam, laptop, emas, kamera digital, paket poin.

Para pengelola situs berlomba-lomba untuk mendesain situsnya semenarik mungkin serta mudah diakses oleh siapa saja. Pengelola tersebut menawarkan barang-barang yang sedang diminati oleh masyarakat serta menyediakan etalase untuk memamerkan barang-barang yang akan dilelang, sedang dilelang, maupun barang yang sudah terlelang.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelelangan secara online adalah penyelenggara lelang online dan peserta lelang online. Untuk ikut dalam lelang online, peserta lelang online diharuskan mendaftar di website lelang yang bersangkutan dan membeli sejumlah point yang berfungsi sebagai uang untuk ikut menawar barang.

Peminat terhadap situs lelang secara online ini kian hari kian meningkat hal ini dikarenakan tidak perlu mengeluarkan biaya, selain itu beberapa keuntungan lainnya yang diperoleh diantaranya :<sup>2</sup>

1. Tidak Terbatas oleh Waktu : dengan situs lelang online, kita dapat melakukan penawaran kapanpun kita mau, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
2. Tidak Terbatas oleh Tempat : kita tidak perlu melihat wajah saingan-saingan yang ikut menawar item favorit, karena bisa jadi kita dan mereka berdiri pada benua yang berbeda, tentunya selama tempat tersebut terjangkau Internet.

---

<sup>2</sup> <http://kuliaah-notariat.blogspot.com/2009/03/tata-cara-pelelangan-secara-on-line.html>

3. Jumlah Penawar yang Besar : jika seluruh penawar pada sebuah website lelang online yang besar (misalnya eBay) dikumpulkan menjadi satu, rasanya tidak akan ada tempat yang nyaman untuk menampung mereka semua. Sementara semakin banyak penawar, maka itulah yang diharapkan oleh pengelola lelang. Lelang online menyediakan ruang yang cukup sekalipun semua manusia di dunia berpartisipasi.
4. Jumlah Penjual yang Besar : dengan adanya jumlah penawar yang besar, tentunya juga memicu penjual untuk memasang barangnya, tentunya ini harus didukung oleh kemudahan-kemudahan yang disediakan pada website yang bersangkutan.
5. Jaringan Ekonomi : dengan adanya jumlah penawar yang besar, akan memicu lebih banyak penjual, demikian juga sebaliknya. Hal ini akan menimbulkan siklus ekonomi permintaan dan persediaan, menjadikan sebuah sistem yang berguna bagi pesertanya.

Sistem lelang online, meskipun terdapat beberapa keuntungan, tapi tidak luput dari kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>3</sup>

1. Informasi barang yang dijual kurang jelas, sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda di benak konsumen. Tidak jarang ini memang disengaja. Misalnya, kerusakan atau cacat produk tidak disebutkan, atau fungsi barang tidak seperti yang diiklankan. Modus lain adalah barang yang telah dipesan tidak dikirim sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>3</sup> ibid



2. Hanya berdasarkan kepercayaan. Tidak ada jaminan pembeli membayar atau penjual memberikan barangnya, meskipun pengelola situs mengancam memasukkan penjual yang curang ke dalam daftar hitam (black list), namun masih tetap ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan.

Kelemahan dari sistem lelang online tersebut disebabkan para penyelenggara lelang online tidak tahu sistem (software) yang diterapkan, standar level sumber daya manusia (SDM) operatornya, spesifikasi perangkatnya (hardware), *security system* terkait kerahasiaan data penawaran seperti apa pada sarana *settlement* yang belum memadai, sistem *delivery* yang lambat dan kurang dapat dipercaya, cara pembayaran yang kurang aman, serta dukungan perangkat hukum di media internet masih sangat lemah.

Keluhan-keluhan yang sering diutarakan oleh para peserta lelang online antara lain : barang yang seharusnya telah dimenangkannya tidak dikirimkan oleh pihak penyelenggara lelang online dengan alasan pemenang lelang belum mentransfer sejumlah uang, pemenang lelang sudah mentranfer sejumlah uang akan tetapi pihak penyelenggara lelang mengatakan bahwa pihak tersebut tidak memenangkan barang yang dilelang, ada juga kasus ketika barang lelang telah dimenangkan dan pihak penyelenggara lelang membatalkan pelelangan barang tersebut secara sepihak dengan alasan server tidak memungkinkan untuk melanjutkan lelang karena sedang crash/down.<sup>4</sup>

Berikut adalah kilasan kasus yang terjadi pada lelang online : Pada tanggal 6 Juni 2009 pemenang dengan user id Bekobeko86 telah memenangkan barang

---

<sup>4</sup> <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2034036>

lelang berupa 1 (satu) buah handphone BlackBerry Bold dengan harga Rp 26.000. Setelah memenangkan barang tersebut, kemenangan tersebut telah diumumkan melalui homepage situs lelang yang bersangkutan yaitu dihalaman etalase serta account pribadi Bekobeko86. Selain itu pihak penyelenggara lelang juga telah mengirimkan pemberitahuan melalui email kepada Bekobeko86. Besoknya ketika Bekobeko86 mengkonfirmasi kemenangannya tersebut kepada customer service, pihak penyelenggara lelang menyatakan bahwa Bekobeko86 bukanlah salah satu dari pihak-pihak yang memenangkan lelang. Setelah itu Bekobeko86 langsung mengecek ke website situs lelang yang bersangkutan dan barang yang sudah dimenangkan telah dihapus dari websitenya. Pemberitahuan yang berada di account pribadi juga telah hilang padahal Bekobeko86 tidak pernah menghapus pemberitahuan yang berada di accountnya tersebut.

Menurut survei FBI tahun 2006, sekitar 44,9 persen pengaduan yang masuk terkait dengan penipuan di situs lelang.<sup>5</sup> Kebanyakan dari situs lelang tersebut tidak mencantumkan alamat tempat kedudukan badan hukumnya, sehingga keluhan-keluhan para pembeli barang lelang hanya dapat disampaikan melalui media *Yahoo! Messenger* (YM). Dari fakta yang ada dapat diketahui bahwa posisi peserta lelang online sangat lemah untuk memperoleh haknya, sehingga sering kali dirugikan oleh para penyelenggara lelang online yang tidak memiliki itikad baik. Untuk mencegah hal tersebut peserta lelang online harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan kajian dan telaah yang berkaitan dengan permasalahan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**

---

<sup>5</sup> <http://fajarririntokrat.blogspot.com/>

**PESERTA LELANG ONLINE BERDASARKAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi peserta lelang online akibat adanya manipulasi data sesuai dengan aturan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah peraturan tetap dalam upaya penyelesaian kasus manipulasi data peserta lelang online apabila Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak bisa memberikan perlindungan hukum?

**C. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta lelang online akibat adanya manipulasi data sesuai dengan aturan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- b. Menganalisis upaya penyelesaian kasus manipulasi data terhadap peserta lelang online, jika Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat memberikan perlindungan hukum.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk mendukung proses belajar mengajar bagi segenap civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Praktisi Lelang**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya para praktisi lelang yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk mempermudah proses pelelangan secara online baik bagi penyelenggara ataupun peserta lelang. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan langkah pilihan (alternatif) bagi para praktisi lelang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manipulasi data peserta lelang.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterima sebagai masukan untuk merumuskan dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan lelang online, agar kebijakannya dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi para praktisi lelang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian, rumusan masalah yang dapat dikaji untuk

memperoleh tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu juga berisi tentang metode penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai lelang, tinjauan umum mengenai e-commerce, tinjauan umum mengenai perjanjian, serta tinjauan umum mengenai wanprestasi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang permasalahan hukum yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu apakah praktek penjualan lelang online yang ada tersebut sudah sesuai dengan *Vendureglement* (V.R.), *Venduinstructie* (V.I.) maupun peraturan lelang lainnya serta perlindungan bagi konsumen terhadap maraknya penipuan yang berkedok lelang online dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dalam sistem lelang di dunia maya ketika mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran dari penulis yang diharah bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perjanjian

##### A.1 Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III yang berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*) dalam Pasal 1349 memberikan perumusan tentang yang dimaksud dengan suatu perjanjian. Tetapi perumusan ini sama sekali tidak lengkap dan dilain pihak maknanya terlalu luas.

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan persamaan dari istilah “Overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris, oleh karena itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari pada istilah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>6</sup>

Menurut R. Subekti S.H. dan R.Tjitrosudibio, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>7</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan

<sup>6</sup> Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 2.

<sup>7</sup> Lihat, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>8</sup>

## A.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perjanjian mengandung unsur :

1. Sedikitnya terdapat dua pihak.
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu.
6. Ada syarat-syarat tertentu.

### A.2.1 Sedikitnya terdapat dua pihak.

Pihak dalam perjanjian adalah subyek hukum, dimana yang dimaksud dengan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, segala sesuatu disini berupa manusia dan badan hukum. Status subyek hukum diperoleh karena bawaan lahir dan hukum hanya mengakui saja. Status itu melekat pada manusia sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Hali ini

---

<sup>8</sup> P. N. H. Simanjuntak, S. H., **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan : Jakarta, 2005, hal 331

dikecualikan dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, dimana untuk menjadi subyek hukum ia harus cakap dan kewenangan berbuat dalam lapangan hukum yakni kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap / tidak wenang melakukan perbuatan hukum adalah :<sup>9</sup>

1. Orang yang belum dewasa yaitu anak di bawah umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW).
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW ).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Orang yang cakap atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan sehat akal pikirnya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Khusus untuk wanita yang dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum dalam hal <sup>10</sup>:

- 1) Membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau ijin dari suami (Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 2) Menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami (Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, 1992 : 4

<sup>10</sup> Op.Cit Simanjuntak hal 24-25



Untuk wanita yang sudah menikah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, wanita kawin telah dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa seijin suaminya terlebih dahulu.

Sedangkan kedudukan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia diperoleh dari hukum, misalnya: memiliki kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan anggotanya, dapat menggugat dan digugat di muka hakim, dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum. Dalam bertindak badan hukum diwakili oleh organ badan hukum atau pengurusnya, karena badan hukum tidak dapat bertindak sendiri seperti layaknya manusia.

#### **A.2.2 Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut.**

Persetujuan harus dibedakan dengan perundingan. Perundingan adalah tindakan pendahuluan untuk mencapai persetujuan, sedangkan persetujuan ditunjukkan dengan adanya penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang ditawarkan dan dirundingkan, biasanya adalah syarat-syarat dan obyek perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, definisi tawaran adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat.<sup>11</sup> Penerimaan terhadap suatu tawaran dapat dinyatakan dengan tulisan, lisan, maupun dengan perbuatan. Jika pihak lain telah melakukan penawaran yang wajar atau pemberitahuan, maka diamnya seseorang dapat diartikan sebagai suatu penerimaan.

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad 1990:108

### **A.2.3 Adanya tujuan yang hendak dicapai.**

Perjanjian dibuat dengan tujuan memenuhi kebutuhan para pihak yang hanya dapat dipenuhi melalui adanya perjanjian tersebut, misalnya: dalam perjanjian jual beli tujuan yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan debitur akan barang dan jasa dari kreditur dengan imbalan harga yang berupa sejumlah uang.

### **A.2.4 Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.**

Perjanjian menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Prestasi itu sendiri dapat berupa tindakan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ini diatur dalam buku ketiga tentang perikatan pasal 1239 sampai dengan pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **A.2.5 Ada bentuk tertentu.**

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dapat berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa.<sup>12</sup> Undang-undang menetapkan bahwa untuk beberapa perjanjian tertentu bentuk perjanjian tersebut menentukan keabsahan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat apabila dibuat dalam bentuk akta otentik, dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya sebagai alat pembuktian tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut.

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni Bandung, 1994, hal 89.

Perjanjian secara lisan dibuat dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya agar dapat dipahami oleh para pihak, kecuali para pihak menghendaki supaya perjanjian itu dibuat dengan bentuk tertulis.

#### **A.2.6 Syarat Sah Perjanjian.**

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Selain syarat-syarat di atas para pihak dapat menambahkan syarat-syarat lain dalam perjanjian yang mereka buat. Syarat-syarat ini dapat disebutkan secara tegas dan khusus serta disetujui oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat. Dalam perkembangan saat ini, sudah sering terjadi pembuatan kontrak tanpa para pihak bertemu muka terlebih dahulu, namun melalui media telekomunikasi seperti *e-commerce*.

Pada *e-commerce* termasuk juga lelang online, timbul masalah dalam hal melacak transaksi tersebut dibuat oleh orang yang belum dewasa/cakap atau orang yang mempunyai maksud jahat. Di samping tidak dapat mengetahui kedewasaan/kecakapan dalam membuat perjanjian, terdapat juga kendala mengenai kriteria yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya mengenai kedewasaan/ kecakapan.



### **A.3 Lahirnya Perjanjian**

Hukum perjanjian menganut asas konsensualisme yang berasal dari kata "konsensus" artinya hukum perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya konsensus. Sedangkan yang dimaksud dengan kata sepakat adalah ada kesesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1338 BW). Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak dikehendaki pula oleh pihak yang lain. Tercapainya sepakat ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan sebagai tanda bukti bahwa para pihak tersebut telah menyetujui segala sesuatu yang tertera di atas tulisan tersebut. Hal tersebut berlaku jika persetujuan itu bersifat konvensional, tetapi lain halnya jika bersifat riil dan formil.

### **A.4 Pembatalan Perjanjian**

#### **A.4.1 Syarat pembatalan perjanjian**

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila :

- 1) Dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum.
- 2) Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- 3) Dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer).

Dalam Pasal 1266 KUHPer dapat disimpulkan, bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan perjanjian, yaitu :

- 1) Perjanjian bersifat timbal-balik.
- 2) Pembatalan harus dimuka hakim.
- 3) Harus ada wanprestasi.

Menurut Prof. Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim.
- 2) Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian tersebut adalah putusan hakim. Menurut Pasal 1454 KUHPer, permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun.

#### **A.4.2 Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (*dwaling*)**

Kekhilafan (*dwaling*) adalah gambaran yang keliru mengenai subyek atau obyek dengan siapa perjanjian itu dilaksanakan. Menurut Pasal 1322 KUHPer, pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan hanya mungkin dalam 2 hal, yaitu :

- 1) Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.
- 2) Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.

---

<sup>13</sup> P. N. H. Simanjuntak, S. H., **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan : Jakarta, 2005, hal 247

#### **A.4.3 Pembatalan perjanjian karena paksaan (dwang)**

Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga terpaksa menyetujui perjanjian itu (Pasal 1324 KUHP). Paksaan ini berupa paksaan rohani atau paksaan jiwa, dan bukan paksaan secara badan (fisik). Ancaman ini harus dengan sesuatu perbuatan yang terlarang dan memungkinkan jika paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga (Pasal 1323 KUHP). Apabila yang diancamkan sesuai dengan tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan.

#### **A.4.4 Pembatalan perjanjian karena penipuan**

Penipuan (*bedrog*) adalah suatu rangkaian kebohongan dimana pihak yang satu dengan tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1328 KUHP, penipuan merupakan alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan. Penipuan ini tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

### **B. Kajian Umum Tentang Lelang**

#### **B.1 Pengertian Lelang**

##### **B.1.1 Pengertian Lelang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah:

1. Menjual dengan jalan lelang;



2. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang;
3. Memborongkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lelang tidak dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan pekerjaan.

### **B.1.2 Pengertian lelang menurut pendapat pakar lelang<sup>14</sup>**

1. Polderman dalam disertasinya tahun 1913 berjudul *“Hat Operbare Aan Bod”* berpendapat bahwa :

”Penjualan Umum adalah : Alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.

Dalam definisi lelang yang diberikan Polderman tersebut titik beratnya pada menghimpun para peminat (pengumuman lelang)”. Dengan demikian, ada tiga syarat untuk lelang yang diberikan Polderman, yaitu:

- a. Penjualan harus selengkap mungkin;
- b. Ada kehendak mengikat diri;
- c. Pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

2. Roell. Kepala Inspeksi Lelang tahun 1932 berpendapat bahwa:

” Penjualan Umum adalah : Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual suatu atau lebih dari satu barang, baik secara

---

<sup>14</sup> Peraturan dan Instruksi Lelang, Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH

pribadi maupun dengan perantaraannya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap.” Titik berat dari definisi yang diberikan Roell adalah pada kesempatan penawaran barang.

3. Wennek, Balai Lelang Rippon Boswell and company Swiss, berpendapat bahwa:

*“An Auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one at a time, commencing at a set time on a set day. The Auctioneer conducting the auction invites offer of prices for the item from the attenders.”*

4. Christopher L. Allen, Auctioneer dan Australia, berpendapat bahwa:

*“The sale by auctions involves an invitation to the public for the purchase of real or personal property offered for sale by making successive increasing offers until, subject to the seller reserve price the property is knock down to the highest bidder.”*

Pengertian lelang tidak hanya sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pelaksana dari *Vendu Reglement*, dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi : Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat, namun jugs harus dilakukan dengan campur tangan/ dihadapan di depan Pejabat Lelang dan untuk setiap pelaksanaan lelang harus dibuat berita acara tersendiri (Risalah Lelang) oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.

Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan;
2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu;
3. Dilakukan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang kompetitif;
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/ pembeli;
5. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan campur tangan/dihadapan/di depan Pejabat Lelang;
6. Setiap pelaksanaan lelang harus dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.

## B.2 DASAR HUKUM LELANG

Secara garis besar, dasar hukum lelang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

### 1. Ketentuan Umum

Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undangnya tidak secara khusus mengatur tentang tata cara/prosedur lelang.

- a. "*Burgelijk Wetboek*" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl. 1847/23 antara lain Pasal 389, 395, 1139(1), 1149(1);
- b. "*Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering/RBG*" (Reglement Hukum Acara Perdata untuk daerah di luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927 No. 227 Pasal 206–228;
- c. "*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*" atau Reglement Indonesia yang diperbaharui/ RIB Stbl. 1941 No. 44 a.1 Pasal 195-208;



- d. UU No. 49 Prp 1960 tentang PUPN, Pasal 10 dan 13;
- e. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 35 dan 273;
- f. UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- g. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 6;
- h. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;
- i. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- j. UU No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Indonesia;
- k. UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Membayar Utang;
1. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Peraturan Teknis, yaitu peraturan penundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang.
  - a. “*Vendu Reglement*” (Undang-Undang Lelang) Stbl. 1908 No. 189 yang terdiri dari 49 Pasal;
  - b. “*Vendu Istructie*” (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) Stbl 1908 No.190 yang terdiri dari 62 Pasal;
  - c. Instruksi Presiden No.9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 jo Nomor 451//K.MK.01/2002 tentang Pejabat Lelang;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.
3. Gambaran Ringkas Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) Stbl. 1908 No. 189, Instructie Lelang (*Vendu Instructie*) stbl. 1908 No. 190 dan Peraturan Pemungutan Bea Lelang untuk Pelelangan dan Penjualan Umum Stbl No. 390.
- a. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) Stbl. 1908 No. 189 jo Stbl. No.56.

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*) ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Penjualan di Muka Umum (lelang). Dari 49 Pasal tersebut dapat diperinci dalam Pasal-pasal yang masih aktif, Pasal-pasal yang tidak efektif dan Pasal yang dihapus/dicabut.

1) Pasal-pasal yang masih aktif ada 27 Pasal, yaitu:

Pasal 1, la, 1b, Pasal 2, Pasal 3 (dengan penyesuaian istilah), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.

2) Pasal-pasal yang tidak efektif ada 13 Pasal, yaitu:

Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38.

3) Pasal-pasal yang sudah dihapus/dicabut. yaitu:

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,  
Pasal 36, Pasal 47.

b. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) Stbl. 1908 No. 190.

“*Vendu Instructie*” ini merupakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *Vendu Reglement* dan terdiri dari 62 Pasal yang dapat diperinci sebagai berikut:

1) Pasal-pasal yang masih aktif ada 32 Pasal, yaitu masing-masing:

Pasal 1, 7, 8 (dengan penyesuaian istilah), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12,  
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 (sebagian masih aktif),  
Pasal 22, Pasal 23 (tidak pernah dilaksanakan), Pasal 24 (sebagian  
masih aktif), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,  
Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,  
Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 (tidak efektif untuk Kantor  
Lelang Negara, tetapi efektif untuk Kantor Pejabat Lelang Kelas II)  
dan Pasal 60.

2) Pasal-pasal yang tidak efektif ada 25 pasal, yaitu:

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 13 a, b, c,  
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 34,  
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55,  
Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.

3) Pasal-pasal yang sudah dihapus/dicabut ada 5 pasal, yaitu:

Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 61 dan Pasal 62.



### B.3 Perbedaan Antara Lelang Konvensional Dengan Lelang Online

**Tabel 1.1**  
Perbedaan lelang konvensional dengan lelang online

Pembeda	Lelang Konvensional	Lelang Online
<b>Pelaksanaan</b>	Dilakukan dihadapan Pejabat Lelang	Tidak dihadapan Pejabat Lelang
<b>Waktu</b>	Tertentu	Bebas
<b>Tempat</b>	Ditentukan	Bebas
<b>Pengumuman Lelang</b>	Surat kabar harian/media lainnya	Website lelang
<b>Pejabat Lelang</b>	Ada	Tidak ada
<b>Pemandu Lelang</b>	Ada	Tidak ada

Dalam lelang konvensional, pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang berwenang, sedangkan pada lelang online tidak harus. Waktu pelaksanaan lelang konvensional dilakukan pada jam dan hari kerja Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), sedangkan pada lelang online waktu pelaksanaannya bebas. Tempat pelaksanaan lelang konvensional harus berada di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat benda berada, sedangkan pada lelang online tempat pelaksanaan melalui website situs lelang yang bersangkutan jadi selama dapat menjangkau jaringan internet maka lelang dapat dilakukan.

Pengumuman lelang konvensional dilakukan melalui surat kabar harian atau media lain, sedangkan pada lelang online cukup memuat pengumuman pada website situs lelang yang bersangkutan. Pejabat Lelang pada lelang konvensional adalah orang yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan

Penjualan barang secara lelang, sedangkan pada lelang online fungsi dari Pejabat Lelang telah digantikan oleh sistem komputer.

Pemandu Lelang (*Afslager*) pada lelang konvensional adalah orang yang bertugas untuk membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang, sedangkan pada lelang online tidak dikenal adanya Pemandu Lelang (*Afslager*).

### C. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan kaedah dalam statu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Perlindungan hukum mengenal banyak sekali definisi, salah satunya adalah menurut Philipus M. Hardjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>16</sup>

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setelah Amandemen II, yang berbunyi :  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* . Pasal tersebut pada dasarnya memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hukum di Indonesia, karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa menjadi hak

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta, Liberty, Hal. 40.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hal 205.

setiap orang untuk memperoleh keamanan dan perlindungan. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :<sup>17</sup>

1. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini bertujuan menyelesaikan sengketa oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Upaya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi yang bersifat represif dapat ditempuh melalui jalur penal dengan menggunakan ketentuan sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada upaya ini dilakukan melalui perangkat sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap pengguna teknologi informasi dengan menggunakan jalur penal lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat penumpasan, dimana upaya penal ini dapat dilakukan jika suatu kejahatan tersebut telah terjadi.

2. Perlindungan hukum preventif

Upaya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dapat ditempuh melalui jalur non-penal yang bersifat preventif, dimana pada upaya ini dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Upaya ini ditempuh untuk mencegah sebelum kejahatan tersebut terjadi, upaya preventif ini dilakukan melalui pembinaan oleh aparat Pemerintah melalui penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

---

<sup>17</sup> <http://222.124.143.238/tesis/karyaview.php?Nourut=0000000845>.



#### D. Kajian Umum Tentang E-Commerce

Istilah *Electronic Commerce* belum memiliki istilah yang baku. Terdapat beberapa istilah yang dikenal pada umumnya seperti *E-Commerce*, *WEB Contract*, dan Kontrak Dagang Elektronik. Namun dalam tulisan ini, istilah yang digunakan adalah *e-commerce*.<sup>18</sup>

*E-commerce* merupakan bagian dari *Electronic Bussines* (bisnis yang dilakukan melalui media elektronik). Kalangan bisnis memberikan definisi tentang *e-commerce* sebagai segala bentuk perniagaan / perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik, jadi tidak terbatas pada media internet. Beberapa keuntungan penggunaan internet sebagai media perdagangan, antara lain :<sup>19</sup>

a. Keuntungan bagi pembeli :

- 1) Menurunkan harga jual produk.
- 2) Meningkatkan daya kompetisi penjual.
- 3) Meningkatkan produktifitas pembeli.
- 4) Manajemen informasi yang lebih baik.
- 5) Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang.

b. Keuntungan bagi penjual :

- 1) Identifikasi pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik.
- 2) Manajemen pengeluaran uang yang baik.
- 3) Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (*tender*).
- 4) Meningkatkan efisiensi.

<sup>18</sup> <http://www.scribd.com/doc/21576787/perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce>

<sup>19</sup> Ustadiyanto, Rieke, 2001, *Framework eCommerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 13.

- 5) Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang.
- 6) Mengurangi biaya pemasaran.

*E-Commerce* merupakan bentuk transaksi perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara fisik tetapi cukup melalui media internet. Aktivitas *e-commerce* dapat dikategorikan dalam 6 jenis aktivitas, yaitu

,<sup>20</sup>

- a. Perusahaan ke Perusahaan (*Business to business*): meliputi *Inter Organizational System* (IOS), yaitu transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
- b. Perusahaan ke Konsumen (*Business to consumer*): transaksi *retail* dengan pembelanjaan (*shopper*) individu.
- c. Konsumen ke Konsumen (*Consumer to consumer*): dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Beberapa situs pelelangan (*auction*) membolehkan individu untuk meletakkan barang. Pada akhirnya banyak individu menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan barang untuk penjualan atau pelayanan.
- d. Konsumen ke Perusahaan (*Consumer to business*): meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi.
- e. *Nonbusiness e-commerce*: lembaga non-bisnis, seperti lembaga akademi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan lembaga pemerintahan

---

<sup>20</sup> Hasanuddin Rahman, **Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis**,

menggunakan bentuk *e-commerce* untuk mengurangi pembiayaan atau memperbaiki operasional atau pelayanannya.

- f. *Intrabusiness organizational e-commerce*: meliputi semua kegiatan organisasi internal.

Menurut Muhammad Aulia Adnan, dalam dataran praktis *e-commerce* hanya dikenal 2 (dua) macam, yaitu :

- a. *Business to business e-commerce (B2B e-commerce)*: bentuk transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih.
- b. *Business to consumer e-commerce (B2C e-commerce)*: bentuk transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen akhir.

#### **E. Kajian Umum Tentang Pasal 35 Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Yang dimaksud manipulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu secara terampil. Sedangkan menurut wikipedia yang dimaksud dengan manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai,



manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan penciptaan adalah tindakan menciptakan atau menyebabkan ada. Sedangkan pengertian perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berubah, peralihan, pertukaran, menjadi lain dari keadaan semula. Pengertian dari kata penghilangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi penghapusan atau membuat jadi hilang atau menyapukan. Pengertian dari pengrusakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat jadi rusak.

Yang dimaksud informasi elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Yang dimaksud dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Data merupakan bentuk jamak dari kata *datum*, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Data adalah catatan atas kumpulan fakta.<sup>21</sup> Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi (*data is the description of things and events that we face*).

Dalam bahasa sehari-hari data adalah fakta tersurat (dalam bentuk catatan atau tulisan) tentang suatu obyek. Dalam dunia komputer data adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dalam memori menurut format tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.

Sekelompok orang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah dipenuhinya hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif.
2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya,

---

<sup>21</sup> Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Hal.3

serta sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan dari orang atau lembaga yang sama.

Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya pemulihan atas ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan yang telah terganggu, serta biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat. Gugatan yang diajukan bukan merupakan tuntutan membayar ganti rugi, tetapi hanya sebatas :

- a. Permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan seseorang melakukan tindakan hukum tertentu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan tetap tidak mengabaikan aspek kepentingan layanan publik yang harus tetap dilakukan dari pihak tergugat.
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum akibat tindakannya yang merugikan masyarakat.
- c. Memerintahkan seseorang untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan perikehidupan pokok masyarakat yang dilanggarnya.

#### **F. Kajian Umum Tentang Penafsiran Hukum**

Di dalam praktek hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya, karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang



agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Menemukan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga oleh ilmuwan sarjana hukum. Juga para yustisiabel yang mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan, terutama pengacara melakukan interpretasi atau penafsiran.

Interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam Tambahan Lembar Negara.

Metode interpretasi antara lain adalah :<sup>22</sup>

a. Interpretasi Menurut Bahasa atau Gramatikal

Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya sesuai tata bahasa, susunan kata atau bunyinya.

Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar membaca undang-undang. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Metode interpretasi ini biasa juga disebut dengan metode obyektif.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Metode interpretasi ini biasa digunakan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan atau maksud kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah

---

<sup>22</sup> Kansil.1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 66-69.

usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Ketentuan undang-undang yang tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Interpretasi teleologis ini biasa juga disebut dengan interpretasi sosiologis, metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

c. Interpretasi Sistematis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Metode interpretasi sistematis ini adalah merupakan metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain, metode ini biasa pula disebut dengan interpretasi logis.

d. Interpretasi Sejarah atau Historis

Salah satu cara untuk mengetahui makna undang-undang dapat pula dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan sehingga

ditemukan pengertian dari sesuatu istilah yang sedang terjadi. Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

e. Interpretasi Komparatif<sup>23</sup>

Menurut Achmad Ali (2002:175) interpretasi ini adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

Contoh: “perbandingan sistem Hukum antara *anglo saxon* dan *eropa continental*”.

f. Interpretasi Futuristis<sup>24</sup>

Interpretasi dengan penjelasan undang-undang yang berlaku sekarang (*Ius Constitutum*), dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*Ius Constitendum*), yaitu rancangan undang-undang.

g. Interpretasi Mempersempit (*Restrictieve Interpretatie*)<sup>25</sup>

Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi suatu istilah. Misalnya istilah tetangga dalam pasal 666 KUH Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa pekarangan sebelahnya. Akan tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta, Liberty. Hal 159

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Varia Peradilan. XXI No. 251 Oktober 2006. Jakarta: IKAHI. halaman 72



h. Interpretasi Memperluas (*Exstensive Interpretatie*)<sup>26</sup>

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertian yang digunakan sehari-hari. Contoh : Pada pasal 492 KUH Pidana ayat (1) “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Kalimat “dimuka Umum” bukan hanya di jalan lalu lintas, atau yang mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain. Akan tetapi meliputi semua tempat yang tersedia bagi umum dalam hal ini losmen-losmen dan tempat minum.

i. Interpretasi Mempertentangkan (*Argumentum Acontrario*)<sup>27</sup>

Interpretasi mempertentangkan yaitu metode dengan menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan “tiada pidana tanpa kesalahan” adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan.

j. Interpretasi Analogi<sup>28</sup>

Yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Misalnya dalam Pasal 1576 KUH Perdata istilah “menjual”

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum**, Yogyakarta, Liberty. Hal. 165.

<sup>28</sup> Ishaq, 2008, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 256.

dianggap sama dengan memberikan, mewariskan, atau mengalihkan suatu hak pada orang lain.

### G. Kajian Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum<sup>29</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) diatur dalam Buku III titel 3 pasal 1365-1380 BW, termasuk di dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro sama dengan istilah “*technis jurisdis*” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan melalui peninjauan tujuan pasal 1365 BW. Beliau menyamakan istilah perbuatan melawan hukum dengan melanggar hukum. Sedangkan Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”. Lain halnya dengan Sudiman Kartohadiprodjo, beliau menggunakan istilah “tindakan melawan hukum”.

Berbeda dengan hukum pidana, di mana setiap perbuatan pidana dirumuskan secara khusus dalam undang-undang, pada perbuatan melawan hukum pembentuk undang-undang memberikan rumusan umum dalam pasal 1365 BW, yaitu : “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Setelah pasal 1365 BW menentukan rumusan di atas maka selanjutnya pasal 1366 BW mengemukakan bahwa “setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi disebabkan oleh kelalaiannya”.

---

<sup>29</sup> Rachmad Setiawan, 1982, **Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum**, Bandung, Alumni, Hal. 1-33.

Dengan adanya Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila :

### 1. Melanggar hak orang lain atau hak subyektif.

Menurut Meiyers hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi ialah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, nama baik dan kehormatan dan hak-hak harta kekayaan.

Pelanggaran hak subyektif selain terjadi karena perbuatan melawan hukum, dapat juga disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lain, misalnya karena perbuatan pihak ketiga. Pelanggaran tersebut dimasukkan sebagai kriteria perbuatan melawan hukum, karena pelanggaran tersebut pada umumnya sudah dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum.

Seseorang yang merusak barang orang lain dianggap *ipso facto* telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal-hal dimana kerugian disebabkan oleh sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi melawan hukum karena bertentangan dengan norma kepatutan. Jadi dapat dipergunakan sebagai pedoman bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif merupakan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut secara langsung merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif.



## **2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.**

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi dalam putusannya, Hooge Raad menafsirkan kewajiban hukum sebagai kewajiban menurut Undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang.

Penafsiran yang demikian, dikarenakan rumusan Hooge Raad tentang pengertian perbuatan melawan hukum pada tahun 1919 menjiplak secara hurufiah dari rancangan Undang-undang tahun 1913. Melanggar kewajiban menurut Undang-undang tidak hanya Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum (Undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, dapat juga dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW.

## **3. Bertentangan dengan nilai kesusilaan yang baik.**

Tentang “kesusilaan yang baik” tidak dapat diberikan rumusan yang tepat. Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Hingga sekarang belum ada yang secara tepat dapat mengemukakan yang dimaksud dengan “kesusilaan yang baik”.

Pendapat mengenai “kesusilaan yang baik” selalu berubah menurut waktu dan tempat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut pada akhirnya hakimlah yang memutuskan menurut pendapat dan nalurnya. Putusan “Hoge Raad” sehubungan dengan kesusilaan yang baik dapat dilihat dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 mengenai perkara “Cohen lawan Lindenbaum” dan putusan tanggal 29 November 1929.

#### **4. Bertentangan dengan kepatutan.**

Dalam rancangan tahun 1911 telah dipergunakan kalimat, bertentangan dengan kewajiban memelihara sebagai Bapak rumah tangga yang baik. Rumusan ini pada tahun 1913 diubah menjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri sendiri atau barang-barang orang lain. Setiap manusia harus menyadari bahwa dia adalah bagian dari anggota masyarakat dan karenanya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya.

Secara garis besar dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika :

- a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa adanya kepentingan yang layak.
- b. Perbuatan yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.. Dalam hal ini dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Lelang/*Vendu Reglement* (V.R.), Instruksi Lelang/*Vendu Instructie* (V.I.), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.



### 3. Jenis Bahan Hukum

Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka. Bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut bahan hukum primer. Sedangkan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut bahan hukum sekunder.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kajian dan studi terhadap peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Peraturan Lelang / *Vendu Reglement* (V.R.).
- 3) Instruksi Lelang / *Vendu Instructie* (V.I.).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang didalamnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersumber dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha serta melihat pada berita-berita yang terdapat di internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder misalnya Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Indonesia-Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam lelang online.

b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai lelang online. Metode pengumpulan data ini berguna

untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.<sup>30</sup>

## 6. Metode Analisa Bahan Hukum

Setelah penulis memperoleh data secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisa bahan hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan bahan hukum pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan melakukan analisis.<sup>31</sup>

Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu, dengan memaparkan atau menggambarkan secara jelas isi dari suatu peraturan hukum yang terkait dan juga melakukan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

<sup>30</sup> Mohammad Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 211.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali. hal. 250.



## 7. Definisi Konseptual

- i. Pengertian perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan konstitusional bagi perlindungan hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setelah Amandemen II, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

- ii. Pengertian lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun.

- iii. Pengertian informasi elektronik menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- iv. Pengertian transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- v. Pengertian upaya penyelesaian (penyelesaian hukum represif) adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sudah terjadi. Upaya hukum ini digunakan apabila telah terjadi sengketa antara penyelenggara lelang dengan peserta lelang.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Keberadaan Situs Lelang Online (*Online Auction*).

Dari segi peraturan, Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat disebut sebagai dasar penyelenggaraan lelang online. Salah satu situs lelang online (*online trading*) yang telah dikenal secara luas dan memiliki lingkup internasional adalah situs *eBay*. Untuk Indonesia, ada beberapa situs yang merupakan usaha lelang. Dari situs-situs yang ada dapat dibedakan menjadi :

1. Situs yang menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara online, seperti Swinde ([www.swinde.com](http://www.swinde.com)) dan Pelelangan ([www.pelelangan.com](http://www.pelelangan.com));
2. Situs yang hanya mengumumkan tentang barang-barang yang akan dilelang sedangkan lelangnya sendiri akan dilaksanakan secara langsung di kantor usaha lelang tersebut, seperti PT Balai Lelang Indonesia/Balindo ([www.balindo.com](http://www.balindo.com)).
3. Situs-situs yang berupa portal lelang, yaitu dalam situs ditempatkan informasi-informasi umum tentang lelang dan *links* ke situs-situs lelang lainnya. Jadi situs ini sendiri tidak menyelenggarakan lelang online dan juga bukan milik suatu kantor lelang tertentu untuk memberikan informasi tentang barang-barang lelang kantornya. Contohnya, Indolelang ([www.indolelang.com](http://www.indolelang.com)).



Berkeenaan dengan situs-situs lelang online Indonesia, situs lelang Swinde dan Pelelangan, ditemukan oleh penulis pada penelusuran tanggal 20 Januari 2010, akan tetapi pada penelusuran ulang pada tanggal 17 Maret 2010, kedua situs ini sudah tidak ada lagi. Situs lelang ini tampaknya telah ditutup. Tidak ada penjelasan dari pihak pemilik situs mengenai sebab-sebab ditutupnya situs lelang ini. Hal ini menunjukkan bahwa situs-situs lelang online di Indonesia belum stabil keberadaannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut harus disediakan sarana/prasarana yang baik dalam hal jalur komunikasi, harus ada suatu jalur khusus yang lancar dan aman sehingga pengoperasian lelang online tidak terputus/terhambat/terhenti karena jaringan internet yang lambat atau sering gangguan. Meskipun begitu, saat ini telah banyak pihak yang mencoba menyelenggarakan situs lelang online. Minat ini disebabkan jumlah pengguna internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dari data yang diperoleh melalui situs Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam penelusuran tanggal 2 Juli 2010 telah didapatkan tabel mengenai peningkatan jumlah pelanggan dan pemakai internet di Indonesia mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010, yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet**

Tahun	Pelanggan	Pemakai
1998	134.000	512.000
1999	256.000	1.000.000
2000	400.000	1.900.000
2001	581.000	4.200.000
2002	667.002	4.500.000
2003	865.706	8.080.534
2004	1.087.428	11.226.143
2005	1.500.000	16.000.000
2006	1.700.000	20.000.000
2007	2.000.000	25.000.000
2008	10.000.000	30.000.000
2009	-	-
2010	-	45.000.000

Sumber : Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

## **B. Sistem Pada Lelang Online**

Untuk dapat mengikuti lelang secara online, calon peserta lelang diharuskan untuk mendaftar (lelang tertutup). Dengan diterapkannya sistem lelang tertutup yang dapat ditawarkan antara lain :

1. Sistem lelang berbasis *Closed Bid*, artinya hanya peserta yang terdaftar saja yang dapat melakukan penawaran. Pendaftaran ditutup ketika waktu lelang dimulai. Dengan adanya sistem ini jumlah penawar menjadi terbatas.
2. Jumlah point penawaran (*Bid Point*) setiap peserta yang terdaftar adalah sama, umumnya 40 Bid Poin tiap peserta. Dengan demikian setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan barang. Tetapi ada

juga sistem lelang online lain yang umumnya tidak membatasi jumlah poin penawaran.

Pada saat mendaftar calon peserta dibebaskan dalam menentukan *User ID* dan *Password*. Yang dimaksud *User ID* adalah serangkaian huruf dan/atau angka yang merupakan tanda pengenal untuk dapat mengakses account. Sedangkan yang dimaksud dengan *Password* adalah serangkaian huruf dan angka yang merupakan sandi untuk dapat mengakses *account*.

Nama *User ID* bebas selama sopan dan tidak menyinggung SARA. Setiap peserta hanya diperbolehkan memiliki 1 *User ID*. Jika diketahui ada peserta yang memiliki *User ID* lebih dari 1 maka pihak penyelenggara lelang berhak menutup *account* peserta yang bersangkutan

Setelah calon peserta lelang menerima konfirmasi melalui email. Dalam email tersebut calon peserta lelang menerima kode untuk mengaktifkan *User ID* yang telah mereka buat. Setelah *login* maka calon peserta lelang dapat melihat jadwal lelang, memilih lelang yang diinginkan kemudian mengikuti penawaran barang lelang.

Banyak dari lelang online yang menggunakan sistem poin, artinya untuk dapat melakukan penawaran, peserta harus membeli poin terlebih dahulu. Fungsi poin pada lelang online ini sama seperti pulsa pada telepon selular.

Poin yang digunakan untuk memilih lelang biasanya disebut *Reg Point*. Sedangkan poin yang digunakan untuk melakukan penawaran pada saat lelang dimulai disebut sebagai *Bid Point*. Setiap peserta yang mendaftar akan mendapatkan *Bid Point*. *Bid Point* tersebut diambil dari *Reg Point* tiap *User ID*. *Reg Point* dapat dibeli dengan beragam paket, misalnya :



1. Paket Ekonomis (5 Reg poin seharga Rp 25.000).
2. Paket Hemat (20 Reg poin seharga Rp 100.000).
3. Paket Sedang (80 Reg poin seharga Rp 380.000).
4. Paket Besar (200 Reg poin seharga Rp 950.000).
5. Paket Jumbo (500 Reg poin seharga Rp 2.275.000).

Pembelian *Reg Point* dilakukan di member area pada menu Pembelian *Reg Point*. Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang rekening bank yang bersangkutan.

Harga pasaran rata-rata produk di pasaran (tidak tetap). Sebelum mulai lelang : ada batas waktu pendaftaran lelang. Pendaftaran itu ditutup ketika lelang dimulai (sistem lelang tertutup). Peserta yang tidak mendaftar sebelum lelang mulai tidak dapat mengikuti lelang, walaupun ia memiliki *Reg Point*. Waktu perkiraan berakhirnya lelang jika tidak ada lagi yang menawar sudah ditentukan sebelum lelang dimulai.

**Gambar 1.1**  
**Pengumuman Lelang Secara Online**

The screenshot displays an online auction announcement for a **BlackBerry Bold 9700**. The interface includes the following elements:

- Nama Barang**: BlackBerry Bold 9700
- Informasi Lelang**: 5/20 point | brng28
- Coming Soon**: 1 Jan 2010
- Tanggal Mulai**: 1 Jan 2010
- Tombol Register**: Register
- Harga Pasaran**: Rp5.500.000
- Mulai Lelang**: 19:00:00 WIB
- Direncanakan Berakhir**: 20:00:00 WIB

**5/20 point** : artinya untuk mengikuti lelang dibutuhkan 5 *Reg Point* dan setiap peserta yang mendaftar akan mendapatkan 20 *Bid point*. *Bid Point* ini yang nantinya digunakan untuk melakukan penawaran, sedangkan *Reg Point* hanya digunakan untuk mendaftar saja. *Reg Point* ini dapat diibaratkan sebagai Tiket Masuk untuk mengikuti lelang. **brng28** : merupakan kode/identitas barang yang dilelang.

**Gambar 1.2**  
**Proses Lelang Secara Online**



Penawaran dilakukan dengan cara meng-klik tombol tawar pada lelang yang sedang berlangsung. Setiap penawaran yang dilakukan (dengan meng-klik tombol Tawar) maka *Bid Point* akan berkurang satu dan harga bertambah Rp25. Pada gambar diatas Unyil melakukan penawaran dan harga naik menjadi Rp175. Jika tidak ada yang menawar hingga waktu berakhir (00:00:00) maka penawar terakhir (Unyil) yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan barang dengan harga tertera. Jika menawar di 10 detik terakhir maka waktu lelang akan bertambah 10 detik. Sebaliknya jika menawar di atas 10 detik terakhir maka waktu lelang tidak akan bertambah.

Pemenang adalah peserta terakhir yang menawar atau *User ID* yang terdaftar saat waktu lelang berakhir. Barang akan dikirim ke alamat pemenang setelah konfirmasi dilakukan melalui member area pada menu "Daftar Barang Menang" dan mengklik tombol "Kirim Konfirmasi Pemenang". Konfirmasi ini hanya bisa dilakukan jika peserta lelang telah memenangkan barang. Setelah konfirmasi dilakukan pemenang akan menerima email berisi panduan cara pengambilan barang. Barang akan dikirim ke alamat pemenang paling lambat 3 hari setelah konfirmasi diterima oleh pihak penyelenggara lelang. Sebaiknya sebelum konfirmasi dilakukan, pastikan data/identitas yang pemenang lelang masukan saat pendaftaran adalah benar.

Ongkos pengiriman barang ditanggung oleh pemenang. Pihak penyelenggara lelang online akan bertanggung jawab jika ternyata server lelang online mengalami *crash* sehingga menyebabkan proses lelang gagal. Yang termasuk gagal yaitu berhentinya waktu lelang secara tidak wajar (tidak sesuai jadwal). Lelang yang gagal akan diulang kembali pada periode berikutnya dan semua *Reg Point* peserta akan dikembalikan. Pihak penyelenggara lelang online berhak menutup *account* peserta yang melanggar syarat dan ketentuan sehingga menimbulkan merugikan pihak penyelenggara lelang online maupun peserta lainnya.

### C. Perhitungan Harga Dalam Lelang Online

Diawal sudah dijelaskan bahwa lelang online merupakan lelang tertutup sehingga peserta lelang diharuskan mendaftar dan membeli point untuk dapat mengikuti penawaran lelang, misalnya 40 point seharga Rp 200.000, 80 point seharga RP 400.000 dst. Jika dihitung setiap point rata-rata berharga Rp 5.000.



Untuk mengetahui apakah peserta lelang online akan diuntungkan atau dirugikan dalam hal lelang online misalnya, dilelang sebuah Blackberry Bold dibuka dengan harga penawaran Rp 1.000 dan harga lelang mencapai Rp 3.201.000 yang telah dimenangkan oleh user A. Dari harga lelang Rp 3.201.000 muncul pertanyaan apakah pihak pengelola lelang online tidak rugi menjual Blackberry Bold dengan harga Rp 3.201.000. Jawabannya adalah tidak, hal tersebut dapat dibuktikan melalui perhitungan di bawah ini :

$$\frac{\text{Harga Lelang} - \text{Harga Penawaran}}{\text{Kelipatan Lelang}} = \frac{\text{Rp } 3.201.000 - \text{Rp } 1.000}{1000}$$

$$= 3.200 \times \text{bid}$$

Tiap bid = 1 point dikeluarkan = Rp 5.000

**Laba Kotor yang akan diterima oleh penyelenggara lelang online adalah :**

$$3200 \times \text{Rp } 5.000 + \text{Rp } 3.201.000 (\text{harga lelang}) = \text{Rp } 19.200.000$$

**Laba Bersih yang diterima oleh penyelenggara lelang online adalah :**

$$\text{Laba Kotor} - \text{Harga Riil Blackberry Bold} = \text{Rp } 19.200.000 - \text{Rp } 6.600.000$$

$$= \text{Rp } 12.600.000$$

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online Akibat Adanya Manipulasi Data Dalam Aturan Pasal 35 UU ITE**

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Jika di interpretasikan menurut bahasa/gramatikal, maka yang dimaksud dengan :

- Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Sengaja : sejak awal sudah ada niat dan dilakukan dengan kesadaran penuh/kesengajaan.
- Tanpa Hak/Melawan Hukum : sebelum melakukan tindakan manipulasi data, pelaku sudah sadar bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- Manipulasi : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu secara terampil.
- Penciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan menciptakan atau menyebabkan ada.
- Perubahan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berubah, peralihan, pertukaran, menjadi lain dari keadaan semula.
- Penghilangan : pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi penghapusan atau membuat jadi hilang atau melenyapkan.
- Pengrusakan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat jadi rusak.
- Informasi Elektronik : menurut UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik

(*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Dokumen Elektronik : menurut UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Seolah-olah data otentik : hasil dari manipulasi tersebut seakan-akan asli, padahal bukan.

Pasal 35 UU ITE merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif, karena dalam pasal tersebut hanya disebutkan mengenai perbuatan yang dilarang saja sedangkan sanksi disebutkan secara terpisah pada Pasal 51 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Menurut pendapat Penulis, pengaturan dalam Pasal 35 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang sudah cukup jelas. Akan tetapi, kurang dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak dapat menjangkau kasus yang terjadi, khususnya dalam lelang online. Hal ini disebabkan, belum adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun pengaturannya sudah ditetapkan di dalam Pasal 54 ayat 2 yang berbunyi :

“Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.”

Akan tetapi sampai sekarang belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang dibuat mengenai : Lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, pengelolaan nama domain. Padahal sudah hampir 4 tahun sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Selain itu kebanyakan dari peserta lelang online yang dirugikan tidak melaporkan pihak lelang online yang curang tersebut kepada pihak kepolisian. Ketika terjadi peristiwa tersebut mereka hanya menghubungi pihak *customer service* dan ketika pihak yang bersangkutan menyatakan bahwa mereka bukan merupakan pihak yang memenangkan lelang mereka hanya melampiaskan kekecewaan melalui sarana forum diskusi seperti kaskus. Tanpa adanya laporan, maka pihak kepolisian tidak dapat memproses kasus yang ada sehingga pihak lelang online yang curang tersebut akan terus melakukan perbuatannya tersebut.

#### **E. Peraturan Tetap Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Manipulasi Data Peserta Lelang Online Ketika Pasal 35 UU ITE Tidak Bisa Memberikan Perlindungan Hukum.**

Terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai upaya penyelesaian kasus manipulasi data bagi peserta lelang online. Akan tetapi tidak

menutup kemungkinan bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum kepada penyelenggara lelang online. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi pada lelang online ini ada lima, yaitu:

- a) Adanya suatu perbuatan : suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah manipulasi data pemenang lelang online.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum : perbuatan memanipulasi data tidak diperbolehkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku : unsur kesengajaan terpenuhi terpenuhi karena penyelenggara lelang online melakukan manipulasi data tersebut karena targetnya tidak tercapai. Perbuatan pihak penyelenggara lelang online tidak terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.
- d) Adanya kerugian bagi korban : kerugian peserta lelang online dalam hal ini antara lain : berkurangnya Reg Point yang telah dipakai ketika proses lelang online berjalan, penggunaan listrik oleh perangkat komputer sebagai media penawaran dan penggunaan jaringan internet ketika mengikuti proses lelang online.
- e) Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam suatu gugatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) asalkan dapat membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh penyelenggara lelang. Tuntutan ganti rugi yang diperkenankan adalah tuntutan ganti rugi materil (berkurangnya sejumlah reg point, ) atau ganti rugi inmateril (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Ganti rugi kompensasi/ganti rugi aktual yang harus dibayarkan kepada korban atas kerugian yang diderita, sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh peserta lelang online selaku korban, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara lelang online.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta lelang online dalam Pasal 35 UU ITE mengenai rumusan tentang perbuatan yang dilarang sudah cukup jelas. Akan tetapi, kurang dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak dapat menjangkau kasus yang terjadi. Hal ini disebabkan, belum adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai : Lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, pengelolaan nama domain.
2. Peraturan tetap dalam upaya penyelesaian kasus manipulasi data bagi peserta lelang online, ketika Pasal 35 UU ITE tidak bisa memberikan perlindungan hukum tidak ada, karena terjadi kekosongan hukum mengenai upaya penyelesaian kasus manipulasi data peserta lelang online. Akan tetapi peserta lelang online sebagai korban yang merasa dirugikan tetap dapat melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Peserta lelang online sebagai penggugat dapat menuntut pengembalian

pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta ganti rugi asalkan dapat membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh penyelenggara lelang.

## **B. Saran**

### **a. Bagi Pemerintah Selaku Pembuat Kebijakan**

1. Pemerintah secepatnya membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah yang diperlukan antara lain mengenai : lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik, pengelolaan nama domain.
2. Selain itu pengawasan terhadap *e-commerce* khususnya mengenai lelang online harus ditingkatkan sehingga dapat memberikan rasa aman bagi konsumen yang melakukan transaksi secara online. Selain itu masih diperlukan penyempurnaan dalam UU ITE agar tidak ada peluang bagi para pengusaha nakal yang ingin mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya manipulasi data.

### **b. Bagi Praktisi Lelang Online**

Para praktisi lelang seharusnya saling menyadari hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan transaksi *e-commerce*, khususnya lelang, sehingga proses lelang saling menguntungkan dan tidak sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Azriadi Prana dan Gede Artha. 2001. **Hacker Sisi Lain Legenda Komputer**. Jakarta: Medikom Pustaka Mandiri.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. **Aneka Hukum Bisnis**. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 1999. **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ishaq. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardalis. 1989. **Metode Penelitian Suatu Proposal**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. **Hukum Perikatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. 2006. **Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Mohammad. 1988. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak. 2005. **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 1985. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: CV Rajawali.
- Syahrani, Riduan. 1992. **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**. Badung: Alumni.
- Ustadiyanto, Rieke. 2001. **Framework eCommerce**. Yogyakarta: Andi.
- Vardiansyah, Dani. 2008. **Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar**. Jakarta : Indeks.



## WEBSITE

<http://kuliah-notariat.blogspot.com/2009/03/tata-cara-pelelangan-secara-online.html>

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2034036>

<http://fajarririntenkrokat.blogspot.com/>

<http://222.124.143.238/tesis/karyaview.php?Nourut=0000000845>

[http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.php?id=12](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=12)

<http://www.scribd.com/doc/21576787/perindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce>

<http://www.itu.int/newsarchive/wtd/1999/dp.html>

## MAJALAH

Varia Peradilan. XXI No. 251 Oktober 2006. Jakarta: IKAHI.

## UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Vendu Reglement (V.R.).

Vendu Instructie (V.I.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008.

Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik Nomer 11 Tahun 2008.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .



Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem . . .



5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak . . .

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

### BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

#### Pasal 4 . . .



## Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

## BAB III

## INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

## Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## Pasal 6

Pasal 6 . . .



Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu . . .

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .



- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.



## BAB IV

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik

### Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

### Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## BAB V

### TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .



## Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

## Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

## Pasal 22 . . .

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

## Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

## Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 25 . . .



## Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB VII

## PERBUATAN YANG DILARANG

## Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . . .



### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34 . . .



## Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

## Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

## Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.



## BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .



- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta . . .



- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .



- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer

Sistem . . .



bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam

Dengan . . .

ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

### Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses

“Asas . . .



berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat 1  
Cukup jelas.

Ayat 2  
Cukup jelas.

Ayat 3  
Cukup jelas.

Ayat 4  
Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan

Pasal 7 . . .



cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnyanya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15  
Ayat (1)  
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.  
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.  
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)  
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18 ...



## Pasal 18

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

### Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

### Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

### Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

## Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

## Pasal 20

### Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...



Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . . .

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .



- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...



Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51 ...



Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- mewakili korporasi;
- mengambil keputusan dalam korporasi;
- melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

Di-pdf-kan oleh Bambang Nurcahyo Prastowo dari dokumen elektronik .doc dari [www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) bagian regulasi undang-undang.



PERATURAN LELANG  
PERATURAN PENJUALAN DI MUKA UMUM DI INDONESIA  
(Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908)

(Dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3, pasal 1 Peraturan ini telah diganti dengan pasal 1, la, lb.)

Pasal 1. Untuk penerapan peraturan ini dari peraturan pelaksanaan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan "penjualan umum" (openbare verkopen) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. (Vendu-regl. lb, 94.5.)

1a. Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut dalam pasal ini, penjualan di muka umum tidak boleh dilakukan selain di hadapan juru lelang.

Dengan peraturan pemerintah, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang. (S. 1940-503; S. 1941-546.)

Barangsiapa berbuat bertentangan dengan ketentuan pasal ini, akan didenda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu gulden; tindak pidananya dipandang sebagai pelanggaran.

Bila perbuatan termaksud dalam alinea yang lalu dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana akan diajukan dan hukuman akan dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurusnya yang ada di Indonesia, atau jika anggota-anggota itu tidak ada, terhadap wakil-wakil badan hukum itu di Indonesia.

Ketentuan alinea yang lalu berlaku juga terhadap badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau sebagai wakil badan hukum lain.

1b. Cara menyelenggarakan pelelangan ditentukan oleh penjual. (Vendu-regl. 94.5.)

Mengenai barang-barang yang sudah dilelang tetapi belum ada penawaran harga yang disetujui, penjual dapat meminta agar cara pelelangannya diubah.

2. (s.d.u. dg. S. 1917-262; S.1940-56jo. S. 1941-3.) Lelang yang diadakan oleh orang yang dikuasakan oleh juru lelang, dianggap dilakukan oleh juru lelang sendiri.

3. (s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Juru lelang terbagi atas dua kelas.

Orang-orang dari golongan jabatan mana yang termasuk masing-masing kelas, hal itu ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal).

Tempat kedudukan para juru lelang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Directeur van Financien), demikian pula tempat-tempat yang juga dianggap sebagai tempat kedudukan para juru lelang, sejauh mengenai pelaksanaan daftar biaya termaksud dalam pasal 44 peraturan ini, Selanjutnya, harus ditentukan pula termasuk golongan manakah para pejabat termaksud dalam alinea kedua di atas, yaitu para juru lelang yang berkedudukan ditempat-tempat tersebut, di mana batas daerah masing-masing, dan para pejabat manakah yang ditugaskan untuk mengawasi setiap daerah tersebut.

4. (s.d.u. dg. S. 1940-537 jo. S. 1941-3.) Kecuali dalam hal yang ditetapkan pada alinea berikut, tagihan yang timbul dari penjualan yang dilakukan di hadapan juru lelang atas beban pembeli harus dibayar kepada pemerintah, yang wajib membayar hasil penjualan kepada penjual, dengan memperhatikan ketentuan pasal 34.

Jika penjual mengadakan ketentuan di antara syarat-syarat penjualan, bahwa pembayaran oleh para pembeli tidak akan dilakukan kepada pemerintah, maka pemerintah tidak wajib membayar hasil lelang kepada penjual. (Vendu-regl. 19 dst., 21, 25, 31, 34, 42.)

5. Barangsiapa ingin mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang, atau di tempat-tempat di mana ditempatkan pemegang buku, kepada pemegang buku, dengan memberitahukan pada hari atau hari-hari apa penjualan hendak diadakannya.

Permohonan-permohonan untuk itu harus ditulis dalam suatu daftar, yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan atas permintaan mereka.

Penjualan sedapat mungkin diadakan pada hari atau hari-hari yang diminta, dengan memperhatikan peraturan-peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai hal itu. Bila dalam suatu hari permohonan yang diajukan lebih banyak daripada yang dapat dilaksanakan, maka permohonan-permohonan untuk hari tersebut dilaksanakan menurut urutan waktu; penjualan eksekusi dan penjualan perabot rumah tangga (inboedel) orang yang akan pindah mempunyai hak didahulukan, jika permohonan untuk itu diajukan sekurang-kurangnya delapan hari sebelum hari yang dikehendaki.

(s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Urituk penjualan-penjualan selain penjualan harta kekayaan dan penjualan yang diadakan berdasarkan alinea kelima pasal 9, tak seorang pun dapat memperoleh lebih dari satu hari lelang atau penjualan dalam jangka waktu empat belas hari, jika karenanya penjualan yang lainnya harus diundurkan.

Jika suatu penjualan tidak dapat dilaksanakan pada hari yang diminta, maka hal itu harus diberitahukan secepat mungkin kepada pemohon.

(s.d.u. dg. S. 1935-453.) Semua persoalan yang timbul dalam menerapkan pasal ini dan pada umumnya pertanyaan mengenai penjualan manakah yang dipandang sebagai penjualan perabot rumah tangga orang-orang yang akan pindah atau sebagai penjualan harta orang-orang yang meninggal, diputuskan oleh pengawas kantor lelang negeri.

6. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) Jika perlu, pengawas kantor lelang negeri boleh menentukan penjualan barang-barang tidak bergerak, usaha-usaha pertanahan di atas tanah sewa, kapal yang isinya dua puluh meter kubik atau lebih, dan efek (surat-surat berharga) pada suatu hari tertentu dalam satu minggu. (Vendu-regl. 204.)

Penjualan tidak boleh dilakukan pada hari Minggu dan hari besar.

7. Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya.

8. (s.d.u. dg. S. 1910-467; S. 1912-583; S. 1935-453.) Pengawas kantor lelang negeri harus menentukan peraturan umum mengenai jam berapa penjualan harus dimulai, dan jam berapa penjualan dapat dihentikan oleh juru lelang.

Dari peraturan tersebut, atas permintaan dari pemohon dan dengan persetujuan pengawas kantor lelang negeri, dapat diadakan penyimpangan mengenai jam mulainya penjualan.

Jika penjualan dilanjutkan atas permintaan penjual sesudah dapat dihentikan oleh juru lelang atau kuasanya, maka mereka, sarna seperti dalam mengadakan lelang di waktu malam seperti yang disebut dalam alinea berikut, dapat meminta bayaran tambahan kepada penjual untuk diri sendiri dan untuk pegawai lelang bawahannya menurut tarif yang ditentukan oleh kepala pemerintah daerah (I), tanpa mengurangi ketentuan alinea terakhir dalam pasal ini Juru lelang dapat menagih pembayaran di muka, kecuali jika penjualnya adalah pemerintah. (Vendu-regl.44.)

Untuk barang-barang tersebut dalam pasal 6, buku-buku dan barang-barang kesenian atau ilmu lain, serta harta kekayaan, pengawas kantor lelang negeri dapat mengizinkan lelang pada malam hari, dengan pengertian, bahwa izin untuk itu dapat diberikan hanya jika hal itu tidak memberatkan juru lelang dan bawahannya, berhubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan pada siang hari.

Pembayaran tambahan ternaksud dalam pasal ini hanya diperhitungkan untuk penjualan lanjutan dan lelang malam yang diadakan di luar tempat kedudukan juru lelang atau tempat kediamannya.

9. Pengawas kantor lelang negeri harus menentukan tawaran paling rendah untuk pelelangan dengan harga meningkat dan tawaran paling tinggi untuk pelelangan dengan harga menurun.

Dalam hal penjualan dengan memasukkan tawaran dalam sampul tertutup, juru lelang atau kuasanya akan menentukan kapan harga penawaran harus dimasukkan kepadanya. Penawaran harga ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan berisi nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal orang yang memasukkan tawaran tertulis; harga yang ditawarkan dibulatkan dalam rupiah dan sen, ditulis dengan huruf menurut kebiasaan dan ditandatangani oleh orang yang memasukkan tawaran.

Juru lelang atau kuasanya dapat menolak seseorang yang mengajukan lebih dari satu sampul penawaran untuk pelelangan yang sarna.

(s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Jikajuru lelang atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan alinea kedua pasal 1b, mengganti cara pelelangan dengan yang lain, maka batallah penawaran yang sudah diajukan mengenai barang-barang yang bersangkutan, tanpa mengurangi ketentuan alinea kelima dalam pasal ini.

(s.d.t. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Jika dalam syarat-syarat suatu penjualan termaksud dalam alinea pertama pasal 6 ditentukan bahwa pelelangan dengan penawaran menaik dalam satu bulan sesudah mulai akan diikuti oleh pelelangan dengan penawaran menurun, atau sebaliknya, maka penawaran atau persetujuan yang sudah dilakukan, sejauh belum diberikan sebelumnya atau dihentikan, tetap mengikat sampai selesai penjualan, asal urutan cara pelelangan dan saat pelelangan yang kedua disebut dalam syarat-syarat penjualan itu.

Barangsiapa telah memasukkan tawaran tertulis, tidak dapat lagi menarik diri.

10. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) Untuk penjualan umum, upah lelang dihitung menurut ketentuan peraturan pemerintah. Di samping itu, diatur pula penjualan yang diminta tetapi tidak dilangsungkan



pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, dalam hal mana pembatalan yang tidak pada waktunya menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi. (S. 1935-454.)

11-17. *Dicabut dg. S. 1935-453.*

18. (*s.d.u. dg. S. 1934-27,511.*) Dari orang-orang miskin hanya dipungut uang miskin. (*s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.*) Tanpa mengurangi ketentuan alinea keempat pasal ini, jumlah uang miskin untuk penjualan barang-barang tersebut dalam alinea pertama pasal 6 adalah empat perseribu dari jumlah harga penjualan.

Untuk penjualan barang-barang bergerak lain daripada yang disebut dalam alinea kedua pasal ini, jumlah uang miskin adalah tujuh perseribu dari jumlah harga penjualan.

Jika barang-barang termaksud dalam alinea kedua dijual dalam satu bagian dengan barang-barang termaksud dalam alinea ketiga, maka untuk semuanya, uang miskin harus dibayar menurut ketentuan alinea ketiga.

19. (*s.d.u. dg. 8. 1934-27,511; S. 1935-453.*) Upah lelang, sejauh tidak ditentukan lain oleh peraturan pemerintah termaksud dalam pasal 10, dibayar oleh penjual. (*Vide Regelen vendusalaris pasal 1-4, 9, 10.*)

Uang miskin dibayar oleh pembeli, kecuali jika diperjanjikan bahwa harga pembelian tidak akan dibayar kepada pemerintah, dalam hal pengecualian ini uang miskin dibayar oleh penjual.

Jika atau sejauh upah lelang yang harus dibayar oleh penjual tidak dapat diperhitungkan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 34, upah lelang, sebagaimana juga uang miskin yang harus dibayar oleh penjual, harus dibayar dalam delapan hari sesudah penjualan.

Jika tidak membayar dalam jangka waktu tersebut, penjual didenda seperti menurut ketentuan pasal 23. (*Vide Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 476/MKII/7/1972 tanggal 3 Juli 1972, ayat (1).*)

20. (*s.d.u. dg. S. 1935-453.*) Penjualan dilakukan sebagai berikut:

1. untuk barang-barang bergerak yang tidak disebut dalam pasal 6, yang tidak dijual dengan contoh, atau atas permintaan pemerintah, atau dengan perjanjian, bahwa harga pembelian tidak dibayar kepada pemerintah, penjualan dilakukan di tempat barang-barang itu berada, kecuali bila pengawas kantor lelang negeri memutuskan lain;
2. untuk semua barang-barang lain, penjualan dilakukan di tempat yang diinginkan oleh penjual.

Rumah-rumah lelang pemerintah, dengan izin pengawas kantor lelang negeri, dapat digunakan untuk mengadakan penjualan.

Penjualan dengan contoh tidak boleh diadakan tanpa seizin pengawas kantor lelang negeri. Dalam penjualan seperti itu, contoh-contoh harus disegel dengan cap oleh kantor lelang, oleh penjual dan satu atau dua di antara para pembeli, dan jika mereka yang disebut terakhir menghendaki, contoh-contoh itu dapat disimpan di kantor lelang sampai dilakukan penyerahan.

(*s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1935-453.*) Barang-barang termaksud dalam pasal 6, dengan pengecualian efek-efek atas tunjuk, tak boleh dijual kecuali sesudah juru lelang yakin, bahwa penjual memang berhak menjualnya. Bukti-bukti tentang hak menjual ini harus disampaikan kepada juru lelang, dan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum penjualan, harus diperlihatkan kepada peminat di kantor lelang. (S. 1916-517.)

(*s.d.u. dg. S. 1916-583.*) Efek atas tunjuk harus diserahkan pada waktu pelelangan; penjualan batal jika tidak dilakukan penyerahan pada waktu termaksud.

Ketentuan-ketentuan ketiga alinea yang lalu tidak berlaku jika diperjanjikan bahwa harga pembelian tidak akan dibayarkan kepada pemerintah.

(*s.d.t. dg. 8. 1912-583 jo. 8.1913-248; s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.*) Penjualan karena keputusan hakim berdasarkan pasal 197 Reglemen Indonesia, atau pasal 208 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, mengenai barang-barang tidak bergerak yang disita, tidak dapat dilakukan kecuali jika kepada juru lelang diberikan bukti-bukti pengumuman penjualan, sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari penjualan, atau yakin dengan cara lain bahwa pengumuman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Vendu-regl. 37 alinea I a nomor 3° dan alinea kedelapan.)

21. Syarat-syarat penjualan ditentukan oleh penjual.

(*s.d.u. dg. 8. 1935-453.*) Perjanjian termaksud dalam alinea kedua pasal 4 hanya dapat dibuat dalam penjualan barang-barang tersebut dalam pasal 6 dan penjualan barang-barang dagangan dari tangan pertama seisin kayu. Perjanjian itu harus dibuat sedemikian rupa, sehingga sebelum penjualan, sudah ada kepastian, apakah penjualan itu dilakukan menurut ketentuan alinea pertama atau alinea kedua pasal 4.

Jika perjanjian tersebut tidak diadakan, maka berlaku ketentuan dua pasal berikut ini.



Ketentuan alinea yang lalu tidak berlaku untuk penjualan barang-barang pemerintah.

22. (*s.d.u. dg. S. 1910-257; S. 1935-453.*) Kecuali dalam hal termaksud dalam alinea pertama pasal 28, para pembeli harus membayar harga pembelian dan biaya yang menjadi beban mereka dalam waktu tiga bulan sesudah hari penjualan. Tetapi jika penjualan dilakukan dengan penangguhan pembayaran selama sepuluh hari hal ini hanya dapat diperjanjikan oleh penjual dalam penjualan barang dagangan dari tangan pertama seisin kayu atau dengan perjanjian pembayaran tunai, maka pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang diperjanjikan atau pada waktu penjualan.

(*s.d.t. dg. S. 1916-583.*) Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran dalam alinea pertama pasal ini, tagihan pemerintah terhadap pembeli dengan segera dapat dituntut:

- a. jika pembeli tidak membayar tunggakan dari satu utang lelang alan lebih pada teguran pertama yang ditujukan untuk itu;
- b. jika harta kekayaan atau barang-barang tidak bergerak kepunyaan pembeli dijual di muka umum, entah karena kehendaknya sendiri, atau karena keputusan hakim. (Vendu-regl. 232.)

Dalam penjualan barang gadai, pengawas kantor lelang negeri yang bersangkutan harus menentukan apakah akan dilakukan dengan pembayaran tunai atau tidak.

(*s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1940-56jo. S. 1941-3.*) Apa yang harus dibayar oleh penjual sendiri sebagai pembeli barang-barang gadai, sedapat mungkin diperhitungkan dengan penghasilan yang diterimanya.

(*s.d.u. dg. S. 1935-453.*) Jika penjualan dilakukan di depan juru lelang kelas II atau di depan orang yang dikuasakan olehnya, barang-barang yang tidak termasuk harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat atau meninggal dan tidak dijual untuk pemerintah, atas perintah pengadilan atau atas perintah atau dengan izin halai harta peninggalan, harus dijual dengan pembayaran tunai, kecuali bila pengawas kantor lelang negeri memberikan izin tertulis untuk memperjanjikan, bahwa penjualan akan dilakukan dengan kredit.

Pemerintah (Gubernur Jenderal) dapat menentukan bahwa di daerah atau bagian-bagian daerah tertentu penjualan barang-barang termaksud dalam alinea yang lalu harus dilakukan dengan pembayaran tunai, tanpa membedakan di hadapan siapa dilakukan penjualan tersebut, kecuali jika di sini pengawas kantor lelang negeri memberikan izin untuk memperjanjikan bahwa penjualan akan dilakukan dengan kredit.

Izin tertulis seperti yang dimaksud dalam dua alinea yang lalu dan permintaan untuk itu bebas dari meterai.

Pembayaran pada saat penjualan harus dilakukan kepada juru lelang atau kuasanya. Semua pembayaran lain juga harus dilakukan kepada juru lelang, kecuali jika pegawai lain ditunjuk untuk menerimanya.

23. (*s.d.u. dg. S. 1929-491; S. 1930-354.*) Jika tidak dilakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, debitur yang bersangkutan akan didenda 2 % dari apa yang harus dibayarnya, dan bila sesudah satu bulan utang itu belum juga dibayar, denda akan dinaikkan menjadi 5%.

(*s.d.t. dg. S. 1916-583.*) Dalam hal-hal termaksud pacta pasal 22 alinea kedua, denda mulai berlaku sesudah lampau jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam alinea pertama pasal tersebut.

Denda tidak dihitung lagi sejak hari meninggalnya debitur, hila harts peninggalannya diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta kekayaan; juga denda tidak bertambah selama harta kekayaan debitur diurus oleh balai harta peninggalan.

24. Di atas hak istimewa seperti dirnaksud dalam pasal1 139 nornor 3° Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai tagihan terhadap para pembeli, pernerintah rnernpunyai hak istimewa atas semua barang bergerak dan tidak bergerak rnilik debitur dalam urutan tingkatan sesudah utang-utang yang dalam pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberi hak istimewa.

Hak istimewa ini hapus setelah larnpau satu tahun sejak hari penjualan.

25. Kecuali dalam hal penjualan yang disertai perjanjian, bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kepada pernerintah, apakah pembayaran secara kredit diizinkan atau tidak, itu diserahkan kepada kebijaksanaan juru lelang. Dalam pada itu, ia harus rnengurus pembayaran kredit yang belum lunas, yang diizinkan olehjuru lelang sebelumnya, dan jika di tempat yang bersangkutan terdapat lebih dari seorangjuru lelang, ia juga harus rnengurus pembayaran kredit-kredit yang diizinkan oleh rekan-rekan sekerjanya itu, seolah-olah kredit-kredit itu diizinkan sendiri. Setiap juru lelang bertanggungjawab atas pembayaran secara kredit yang diizinkan sendiri atau oleh kuasanya.

Pembayaran secara kredit, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam pasal berikut, harus ditolak :

1. untuk mereka yang bekerja tetap sebagai pembeli barang-barang lelang;
2. untuk mreka yang belum rnembayar lunas utang lelangnya;

3. untuk mereka yang selama dua belas bulan terakhir perlu diberi tindakan khusus supaya membayar utang lelangnya.

(s.d.t. dg. S. 1929-147.) Juru lelang tidak berwenang untuk mengizinkan kredit bagi dirinya sendiri, dan sejauh mengenai pelelangan di kantor lelang kelas 1, bagi pegawai kantor tersebut.

26. Kepada mereka yang menurut pendapat juru lelang tidak menunjukkan jaminan yang cukup untuk pelunasan utang, dan kepada orang-orang termaksud dalam pasal 25 alinea kedua, izin kredit biasa dapat diberikan jika juru lelang yakin bahwa mereka akan memenuhi kewajiban mereka.

Jaminan harus terdiri dari hipotek atas barang tidak bergerak, yang harganya tidak dibebani, sedikitnya sepertiga lebih dari jumlah kredit, atau jaminan satu orang atau lebih yang menurut pendapat juru sita adalah orang yang terpendang, di luar orang-orang termaksud dalam pasal 25. Setiap penjamin harus mengikatkan diri secara perorangan dengan melepaskan hak istimewa akan hasil penjualan, dan jika lebih dari seorang menyatakan diri sebagai penjamin, juga hak istimewa akan pembagian utang. Penjamin dapat ditentukan dengan akta khusus atau dengan lisan sewaktu penjualan dilakukan.

(s.d.u. dg. S. 1929-147.) Penjaminan dapat juga dilakukan dengan penyerahan buku tabungan pos sebagai gadai, asal saja jumlah tabungan tersebut paling tidak sama besar dengan jumlah kredit, atau surat-surat berharga atas tunjuk oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah, yang nilainya harus melebihi jumlah kredit sekian persen menurut ketentuan peraturan pemerintah tersebut. (Vendu-instr. 13b, 13c; S. 1930-84.)

(s.d.u. dg. S. 1929-147.) Penggadaian buku tabungan pos harus segera diberitahukan oleh juru lelang kepada direktur tabungan pos.

27. Kepada siapa pun tidak akan diberikan kredit blangko yang lebih dari dua puluh lima gulden. Barangsiapa menginginkan kredit yang lebih besar, harus melalui cara yang ditentukan dalam pasal 26, yaitu mengadakan jaminan untuk seluruh kredit. Ketentuan dalam kedua alinea di atas tidak berlaku untuk penjualan hasil-hasil perusahaan pemerintah.

28. (s.d.u. dg. S. 1916-538.) Jika blangko kredit ditolak pacta seseorang yang kepadanya penjualan diizinkan, ia harus memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 26 atau membayar pada waktu penjualan. (Vendu-regl. 221.)

Jika hal itu tidak dipenuhinya, maka tidak boleh turut menawar untuk selanjutnya, dan yang telah dilelangkan harus dilelang kembali.

Ia bertanggung jawab terhadap penjual atas kekurangan, jika tawaran yang terjadi pacta pelelangan yang kedua kurang dari tawaran pada pelelangan yang pertama.

29. Yang dianggap sebagai penawar tertinggi dalam penawaran tertulis adalah orang yang memasukkan tawaran tertinggi yang diakui sah oleh juru lelang atau kuasanya, dan yang dianggap dapat diberi kredit oleh juru lelang atau kuasanya itu, atau jika tidak menghendaki kredit, yang membayar secara tunai atau memberikan jaminan menurut ketentuan pasal 26.

30. Jika beberapa orang sama-sama memasukkan penawaran tertinggi atau sama-sama menyetujui harga tertinggi, atau jika di antara tawaran-tawaran yang sah ada dua atau lebih yang sama-sama merupakan tawaran tertinggi, juru lelang atau kuasanya akan menentukan siapa penawar tertinggi.

31. Dalam penjualan yang memuat perjanjian bahwa pembayaran harga pembelian tidak dilakukan pada pemerintah, pemberian atau penolakan kredit, penilaian jaminan para pembeli dan pengambilan keputusan termaksud dalam pasal 30, diserahkan kepada penjual.

32. (s.d.u. dg. S. 1935-453; S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Penjualan barang-barang termaksud dalam alinea pertama pasal 6, dilakukan sejauh dengan syarat, bahwa pembeli berhak menerangkan dengan akta notaris, untuk siapa ia membelinya. Keterangan semacam itu, agar dikuatkan oleh orang yang utuknya dilakukan pembelian, berakibat bahwa orang yang diberi keterangan itu dipandang sebagai pembeli, jika keterangan tersebut, dalam tiga bulan sejak hari diberikan, diperlihatkan kepada dan ditandatangani sebagai tanda diketahui oleh juru lelang, atau jika di kantor lelang ada pernegang buku, kepada dan oleh pernegang buku itu; dan dalam hal ada penjamin, keterangan itu hanya berakibat demikian jika disetujui oleh penjamin itu.

Pembeli pertama dan penjaminnya tetap bertanggung jawab atas harga pembelian dan biaya-biaya.

33. (s.d.u. dg. S. 1918-187.) Jika tagihan pemerintah yang timbul dari penjualan umum belum dilunasi pada akhir tahun timbulnya tagihan, atau sejak dulu dianggap tidak dapat ditagih lagi, maka penagihan dilakukan sebagai berikut:



- a. sejauh mengenai tagihan terhadap pembeli, kepada juru lelang yang di hadapannya atau di daerahnya melakukan penjualan, dan sejauh penagihan utang ditugaskan kepada pegawai-pegawai lain, kepada mereka hila mereka lalai dalam melakukan tugas itu;
- b. sejauh mengenai tagihan terhadap penjual, kepada orang atau orang-orang yang lalai melakukan penagihan.

Besarnya ganti rugi untuk masing-masing ditentukan oleh pernerintah. Jika tagihan yang menjadi beban pembeli timbul dari penjualan yang dilakukan oleh juru lelang kelas II, padanya dikenakan penggantian, jika hanya ia sendiri yang tersangkut dalam penagihan.

Dalam hal-hal lain, soal apakah dan sampai jumlah berapakah menurut pasal ini dikenakan penggantian, tidak diputuskan kecuali sesudah para pegawai yang bersangkutan, para ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak, atau, jika ia tak hadir, para pengurus harta peninggalan, diberi kesempatan untuk menunjukkan, bahwa para pegawai ternaksud tadi dalam menagih utang-utang, dan mengenai juru lelang kelas 1 dalam mengizinkan kredit, telah bekerja sesuai dengan kewajibannya. (S. 1889-192.)

34. Kecuali jika diperjanjikan bahwa pembayaran harga pembelian tidak akan dilakukan kepada pernerintah, untuk hasil penjualan, dengan memperhatikan ketentuan alinea keempat pasal ini, diberikan suatu surat petuliuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar uang: (Vendu-regl. 193.)

- a. (s.d.u. dg. S. 1935-453.) sesudah lampau empat minggu sejak hari penjualan, untuk penjualan dengan kredit sepuluh hari dan penjualan dengan pembayaran tunai;
- b. sesudah lampau empat bulan setelah hari penjualan, untuk yang lain-lainnya.

Surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar yang diberikan kepada dan atas nama orang yang berhak atau wakilnya yang sah dan pada kas negara di daerah tempat kedudukan juru lelang yang melaksanakan penjualan.

Pengganti surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar uang, jika diminta, diberikan kepada yang berhak atau wakilnya yang sah, selekas-lekasnya sesudah penjualan dalam bentuk surat petunjuk pembayaran pada kas negara atau surat perintah membayar uang satu atau lebih akseptasi atas namanya atau atas tunjuk, semuanya sejumlah yang harus dibayar, dan dapat dibayar di kas negara yang ditunjuk di atas dalam empat minggu atau empat bulan sesudah hari penjualan, tergantung pada jenisnya, apakah termasuk yang diuraikan dalam huruf *a* atau *b* dari alinea pertama pasal ini.

(s.d.u. dg. S. 1916-583; S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Surat petuliuk pembayaran pada kas negara, surat perintah membayar uang dan akseptasi diberikan untuk jumlah hasil penjualan, sesudah dikurangi upah lelang dan biaya lelang dalam penjualan barang-barang gadai yang dibebankan kepada penjual, juga setelah dikurangi utang yang harus dibayar penjual sebagai pembeli barang.

(s.d.u. dg. S. 1925-421; S. 1932-210; S. 1934-175.) Surat petuliukpembayaran pada kas negara, surat perintah membayar uang dan akseptasi diberikan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) "Peraturan Pengurusan Administrasi" (S: 1933-381) oleh pejabat yang berwenang untuk menilai, membereskan. dan menentukan dapat tidaknya dibayar tagihan-tagihan atas beban pemerintah.

35. (s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.) Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri.

36. *Dicabut dg. S. 1912-583.*

37. Berita acara berisikan:

- a. di bagian pokok:
  1. tanggal dengan huruf;
  2. nama kecil, nama dan tempat kedudukan juru lelang, serta nama kecil, nama dan tempat kediaman kuasanya jika penjualan dilakukan di hadapan kuasanya itu;
  3. nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang meminta penjualan dilakukan; jika ia tidak bertindak atas namanya sendiri, juga uraian tentang kedudukan di mana ia meminta diadakan penjualan, dan jika berdasarkan pasal 20 juru lelang harus yakin bahwa penjual berhak untuk menjual, juga pendapatnya tentang hal itu;
  4. tempat penjualan;
  5. keterangan umum tentang sifat barang yang dijual; tetapi dalam menurliukkan letak dan batas-batas barang-barang tidak bergerak, harus diterangkan bukti hak milik menurut bunyi kata-katanya, dengan menyebut hak pengabdian pekarangan yang ada di atasnya dan beban yang diletakkan pada barang-barang tersebut;
  6. syarat-syarat penjualan;



- b. di bagian batang tubuh;
  1. uraian tentang barang yang dilelangkan;
  2. nama dan pekerjaan tiap-tiap pembeli; juga tempat kediamannya, jika ia tidak berdiam di tempat penjualan;
  3. harga yang dikabulkan dengan angka;
  4. harga yang dihentikan dengan angka;
  5. (*s.d.t. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.*) dalam penjualan yang dilakukan menurut ketentuan alinea kelima pasal 9, tawaran atau persetujuan harga yang tetap mengikat, juga dengan angka; nama dan pekerjaan penawar atau orang yang menyetujui harga yang bersangkutan, serta tempat kediamannya jika tidak berdiam di tempat penjualan;
- c. pada bagian penutup:
  1. jumlah barang lelang yang laku, dengan hurtle dan angka;
  2. jumlah yang dikabulkan dan jumlah yang ditahan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka.

Jika berdasarkan pemberian kuasa pembelian dilakukan untuk orang lain, maka dalam berita acara harus disebut, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Jika pemberian kuasa itu dilakukan seacara lisan, maka hal itu harus disebut dalam berita aeara dan, jika pemberi kuasa tidak membayar pacta waktunya, maka penerima kuasa bertanggung jawab seolah-olah ia membeli untuk diri sendiri.

Jika pemberian kuasa dilakukan seacara tertulis, maka surat kuasa harus dilekatkan pada berita acara, kecuali mengenai beberapa penjualan, surat-surat harus disimpan di kantor lelang. Jika surat kuasa dibuat di hadapan notaris dengan minut, maka cukuplah hal itu disebut dalam berita acara.

Jika seseorang dengan lisan menjadi penjamin pembeli, maka hal itu harus disebut dalam berita acara. Jika penjaminan dilakukan seacara tertulis, maka akta penjaminan harus dilekatkan pacta berita aeara, kecuali mengenai beberapa penjualan, yang akta-aktanya harus disirnpkan di kantor lelang. Pelekatan termaksud dalam dUB alinea yang lalu harus disebut dalam berita acara.

Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan pacta waktu perliualan yang tidak berdasarkan perjarnjian pembayaran tunai, juga harus disebut dalam berita acara.

(*s.d.t. dg. S. 1912-583.*) Dalam penjualan eksekusi termaksud dalam alinea terakhir pasal 20, dalam bagian pokok berita acara harus dicantumkan bahwa bukti-bukti pengumuman termaksud dalam ketentuan itu telah diberitahukan pada waktunya kepada juru lelang, atau dengan jalan lain ia telah yakin bahwa pengumuman itu telah diberikan.

(*s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.*) Pada permulaan penjualan, juga dalam melanjutkan penjualan yang terhenti di pertengahan pelelangan, bagian pokok berita acara harus dibacakan dengan suara keras oleh atau atas nama juru lelang kepada hadirin. Hal pembaeaan ini harus disebut dalam berita acara.

38. (*s.d.u. dg. S. 1912-583.*) Setiap halaman berita aceara, kecuali halaman terakhir, harus disahkan dengan tanda tangan oleh juru lelang atau kuasanya.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh juru lelang atau kuasanya, dan oleh orang yang utuknya permohonan penjualan itu diadakan; jika ia tidak ingin turut-serta menandatangani atau tidak hadir pada waktu penutupan berita acara, maka hal itu harus dinyatakan dalam berita acara.

Pencantuman bahwa penjual tidak mau melakukan penandatanganan atau tidak hadir, berlaku sebagai penandatanganan

39. Tidak diperbolehkan membuat perubahan atau tambahan dalam berita acara, kecuali pada bagian margin (pinggir) atau, jika di situ tidak terdapat tempat kosong, langsung sebelum tempat tanda tangan berita acara, dengan menunjuk halaman dan baris yang bersangkutan.

Tidak boleh diadakan peneoretan atas kata-kata, huruf-huruf atau angka-angka yang tertera dalam berita acara, kecuali dengan garis tipis sedemikian rupa, sehingga apa yang tadinya tertulis di situ tetap dapat dibaca. Banyaknya kata, huruf dan angka yang digaris, harus dicantumkan di bagian margin halaman kertas.

Semua yang menurut pasal ini ditulis pada bagian margin berita acara, harus ditandatangani oleh para penandatanganan berita acara. (*Vendu-regl. 40.*)

40. (*s.d.u. dg. S. 1912-583; S. 1917-262; S. 1940-56 jo. S. 1941-3.*) Juru lelang bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan pasa1 37, 38 dan 39 tersebut di atas.

41. Berita aeara disimpan oleh juru lelang atau penggantinya; di tempat terdapat lebih dari satu juru lelang, berita aeara disimpan oleh pemegang buku pacta kantor lelang. Juru simpan wajib memperlihatkan berita acara tersebut dengan mengirimbkannya kepada pengawas kantor lelang negeri atas permintaannya.

Kepada penjual dapat diberikan suatu *grosse* dari berita acara dengan pembayaran yang sarna, di atas bea meterai, jika diperjanjikan bahwa pembayaran harga pembelian tidak dilakukan kepada pemerintah; jika perjanjian demikian tidak diadakan, maka *grosse* hanya boleh diberikan kepada pemerintah.

42. (*s.d.u. dg. S. 1916-583*.) Setiap orang yang berkepentingan dapat menerima salinan atau kutipan berita cara yang diotentikkan mengenai penjualan dengan pembayaran atas bea meterai sebesar dua gulden lima puluh sen untuk setiap salinan atau kutipan. (*Vendu-regl. 452.*)

Untuk setiap pembelian tersendiri atau untuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh satu orang yang sarna atau orang-orang yang diizinkan seeara bersama-sama dengan pembayaran yang sarna untuk menyerahkan suatu kutipan berita aeara sebagai *grosse*. Kutipan demikian harus berisikan bagian pokok dan penutup, termasuk pula bagian batang tubuh berita acara, akan tetapi hanya sejauh pembelian yang bersangkutan.

*Grosse* harus memakai kata-kata "Derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" pada bagian kepalanya dan kata-kata "dikeluarkan untuk *grosse* pertama" pada bagian penutup, dan memuat nama orang yang menerimanya.

*Grosse* yang diserahkan secara demikian, baik kepada pembeli dan penjaminnya, maupun kepada orang yang menyatakan diri membeli untuk orang lain atas kekuatan pemberian kuasa secara lisan, diberi kekuatan yang sarna seperti *grosse* akta hipotek dan *grosse* akta notaris, berisikan kewajiban untuk melunasi sejumlah liang, dibuat di Indonesia, dan pada bagian pokoknya dicantumkan kata-kata "Derni keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". (*Rv. 435 dst., 440; JR. 224; RBg. 258.*) Salinan, kutipan dan *grosse* diberikan oleh juru simpan berita acara.

Untuk salinan, kutipan dan *grosse* yang diberikan untuk kepentingan pemerintah, tidak dipungut biaya apa pun juga.

43. Untuk duplikat suatu rekening atau kuitansi yang diberikan kepada orang yang berkepentingan atas permintaannya, dipungut biaya dua puluh lima sen. (*Vendu-regl. 452.*)

44. (*s.d.u. terakhirdg. S. 1935-453.*) Untuk penjualan yang dilakukan di luar daerah tempat kedudukan atau tempat tinggal kuasanya, juru lelang atau kuasanya dan pegawai bawahan kantor lelang dapat memperhitungkan biaya perjalanan dan biaya penginapan kepada penjual menurut daftar biaya untuk itu, yang ditentukan oleh kantor perjalanan negara.

Dari jumlah yang harus dibayar, juru lelang dapat menagih pembayaran dimuka, kecuali jika penjualnya adalah pemerintah.

Untuk penerapan daftar biaya termaksud dalam pasal ini, pemerintah dapat menetapkan peraturan khusus mengenai penjualan harta kekayaan.

45. (*s.d.u. dg. S. 1919-450; S. 1929-491 jo. S. 1930-354; S. 1935-453.*) Bagian mana dalam upah lelang termasuk santi rugi yang harus dibayar kepada juru lelang kelas II karena membatalkan penjualan tidak pada waktunya, itu ditentukan oleh pemerintah, juga dalam hal tidak dibayarnya bagian tersebut.

Pembayaran-pembayaran tersebut dalam pasal 42 dan 43, yang diterima oleh juru lelang termaksud di atas, seluruhnya untuk juru lelang.

(*s.d.t. dg. S. 1929-491jo. S. 1930-354; s.d.u. dg. S. 1940-56jo. S. 1941-3.*) Juru lelang kelas II menerima upah persepsi menurut persentase yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dari jumlah harga pembelian, upah lelang dan uang miskin yang dibayar oleh debitur dan dibukukan.

(*s.d.t. dg. S. 1929-491jo. S. 1930-354.*) Pengurangan upah tidak boleh dilaku- kan berhubung dengan tagihan termaksud dalam pasal 33.

(*s.d.t. dg. S. 1929-491 jo. S. 1930-354.*) Kepada juru lelang kelas II, untuk pembayaran gaji pegawai-pegawai yang diperlukannya, dapat diberikan pem- bayaran di muka, sejauh ditunjukkan pentingnya hal itu, semuanya menurut peraturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

46. (*s.d.u. dg. S. 1917-262,558; S. 1918-187; S. 1940-56jo. S. 1941-3.*) Sejauh tidak ditentukan sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang lalu dari peraturan ini tidak berlaku terhadap peliualan yang dilakukan berdasarkan ketentuan alinea kedua pasal la tanpa perantaraan juru lelang.

(*s.d.u. dg. S. 1935-453.*) Sejauh mengenai perijualan hasil-hasil pemerintah, ketentuan-ketentuan itu, tanpa mengurangi apa yang ditentukan berdasarkan atau dalam pasal 10, 21 alinea terakhir, dan 27, hanya diterapkan sejauh sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku bagi peliualilm-penjualan tersebut.

Dalam hal penjualan kayu pemerintah, jika untuk pembayaran ditentukan jangka waktu yang lain dari jangka waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal 22, maka dalam penerapan pasal 33, kata-kata "tahun timbulnya tagihan" yang terdapat dalam pasal tersebut terakhir, hams diganti dengan kata-

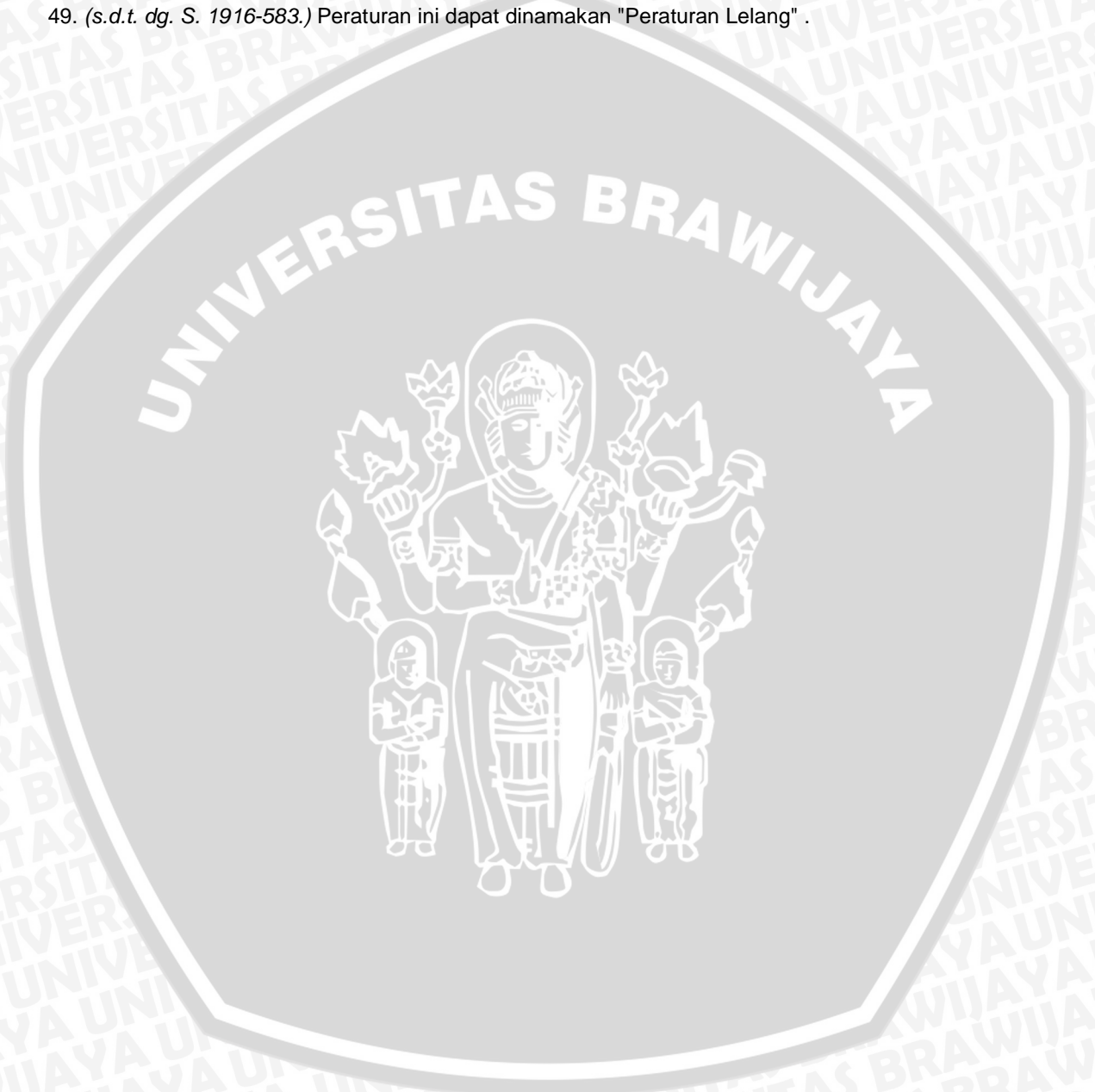


kata "tahun, dalam tahun mana tagihan sudah harus dilunasi menurut syarat-syarat penjualan".  
 .Alinea keempat dihapus berdasarkan S.1940-56jo. S. 1941-3.

47. Dicabut dg. S. 1918-187.

48. (s.d.u. dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3.) Pengertian "juru lelang" dalam peraturan ini mencakup juga pemegang buku atau pembantu pemegang buku (ajung pemegang buku) yang ditugaskan oleh pengawas kantor lelang negeri untuk melakukan penjualan umum.

49. (s.d.t. dg. S. 1916-583.) Peraturan ini dapat dinamakan "Peraturan Lelang".





**INSTRUKSI LELANG**

(Instructie voor de ambtenaren, belast met de toepassing van het reglement op de openbare verkooping in Nederlandsch-Indie)

*Ord. 28 Februari 1908 No. 4, S. 1908-190, s.d.u. dg. S. 1908-537, S. 1910-258 dan 468, S. 1912-584, S. 1914-648, S. 1915-530, S.1916-584, S. 1917-263 dan 559, S. 1919-448, S. 1925-426, S.1929-148 dan 492, S. 1930-85, S. 1931-373jo. 423 dan S. 1940-57.*

**PENGAWAS KANTOR LELANG NEGERI**

**Pas. 1.** (*s.d.u. dg. S. 1929-148.*) Pengawas kantor lelang negeri adalah kepala langsung dari juru lelang, pemegang buku dan kasir, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah yang dipandang perlu untuk kelancaran pekerjaan. Ia wajib mengusahakan agar ketentuan mengenai lelang, ditaati, khususnya dalam memberi kredit. Ia wajib mengawasi, agar ketentuan berita acara semua pelelangan memenuhi syarat-syarat. Ia wajib memberi perintah yang diperlukan agar perlawanan yang diberitahukan kepada kantor lelang mengenai pembayaran uang pembelian (kooppenningen), surat keputusan yang memuat perintah termaksud dalam pasal 487 dan pasal 1015 Reglemen Acara Perdata, atau perdamaian termaksud dalam pasal-pasal 483, 547, dan 1011 reglemen tersebut, selekas mungkin disampaikan kepada juru lelang yang bersangkutan. Ia wajib menjaga dengan segala daya yang ada padanya agar tidak terjadi keterlambatan dalam penagihan uang yang harus dibayar kepada kantor lelang.

**Pasal 2.** (*s.d.u. dg. S. 1940-57.*) Jika ada permintaan untuk mengadakan lelang yang lebih daripada apa yang dapat dilakukan oleh juru lelang, maka pengawas kantor lelang negeri akan menugaskan pemegang buku dan pemegang-buku pembantu untuk melakukan lelang, sejauh pekerjaan pemegang buku, pemegang-buku pembantu dan kasir pembantu mengizinkan.

**Pasal 3.** (*s.d.u. dg. S. 1925-426 dan S. 1940-57.*) Pengawas kantor lelang negeri harus mengirimkan surat yang diterimanya berdasarkan pasal 16, setelah diperiksa dan diberi tanda tangan sebagai tanda persetujuannya, dan surat-surat yang diterimanya berdasarkan pasal-pasal 21, 24, dan 40, kepada pejabat termaksud dalam alinea terakhir pasal 34 Peraturan Lelang (Vendu-reglement).

**Pasal 4.** Pengawas kantor lelang negeri yang bukan kepala daerah, segera setelah mengetahui adanya ketidakberesan dalam pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada kepala daerah.

**Pasal 5.** Pengawas kantor lelang negeri tidak akan memberikan izin untuk mengadakan lelang berdasarkan contoh (monster), bila menurut pendapatnya penjual bermaksud menjual barang yang tidak tersedia.

**Pasal 6.** Pengawas kantor lelang negeri yang bukan kepala daerah, sebelum memangku jabatannya, harus bersumpah di hadapan kepala daerah, "Saya bersumpah bahwa saya selaku pengawas kantor lelang negeri akan melaksanakan

kewajiban saya dengan saksama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta saya".

#### JURU LELANG PADA UMUMNYA

##### Pasal 7.

(s.d.u.t. dg. S. 1908-537 dan S. 1919-448.) Yang termasuk juru lelang kelas I ialah :

- 1<sup>o</sup>. pejabat pemerintah yang diangkat khusus untuk itu;
- 2<sup>o</sup>. kepala kas negara yang ditugaskan untuk memegang jabatan juru lelang sebagai jabatan tambahan.

Yang termasuk juru lelang kelas II ialah:

- 1<sup>o</sup>. pejabat negara, selain yang disebut dalam alinea pertama pasal ini, yang memegang jabatan yang dirangkapkan dengan juru lelang;
- 2<sup>o</sup>. orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.

##### Pasal 8.

Juru lelang wajib mengurus daftar permintaan lelang termaksud pada pasal 5 Peraturan Lelang.

##### Pasal 9.

Juru lelang wajib menjaga ketertiban pelelangan, dan meminta bantuan kepala kepolisian setempat bila perlu untuk itu. Demi ketertiban, pelelangan dapat dihentikan selama waktu yang dianggapnya perlu. Bila digunakan wewenang ini, kepada orang-orang yang berkumpul, juru lelang akan memberitahukan saat dimulai lagi pelelangan.

##### Pasal 10.

Juru lelang boleh mejadi pembeli barang-barang bergerak yang dilelang dihadapannya.

##### Pasal 11.

Juru lelang wajib menyetorkan uang yang diterima dari penjualan barang pada kas lelang selama pelelangan berjalan, secepat-cepatnya setelah lelang selesai.

##### Pasal 12.

(s.d.t. dg. S. 1930-85.) Ia wajib mengurus buku-buku berikut:

- 1<sup>o</sup>. daftar lelang menurut model A atau A-1 yang diperbarui;
- 2<sup>o</sup>. daftar para debitur, untuk tiap lelang tersendiri, menurut model B atau B-1 yang diperbarui;
- 3<sup>o</sup>. buku kas, menurut model C atau C- I yang diperbar-ui;
- 4<sup>o</sup>. daftar para debitur yang belum melunasi utang, satu per satu menurut model D atau D-1;
- 5<sup>o</sup>. daftar jaminan seperti yang disebut dalam pasal 26 Peraturan Lelang, sejauh hal itu diadakan dengan akta khusus, menurut model yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Directeur van Financien).

Pada akhir triwulan, dalam buku kas diadakan rekapitulasi mengenai penerimaan-penerimaan dalam jangka waktu yang bersangkutan dengan penyeterannya ke kas negara dalam triwulan tersebut.

##### Pasal 13.

Ia wajib menyimpan dengan teratur surat-surat resmi yang masuk dan minut surat-surat resmi yang keluar, yang bersangkutan dengan tata usaha lelang, dan memberi nomor urut yang berlaku untuk satu tahun pada surat-surat keluar dan masuk.



Ia wajib mengatur arsip sedemikian rupa sehingga mudah dipergunakan.

**Pasal 13a.**

(s.d.t. dg. S. 1916-584.) Dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, para juru lelang, atas nama pemerintah sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk menerima hipotek atas barang tak bergerak sebagai jaminan bagi kredit yang diberikan pada pelelangan, turut dalam pembuatan akta tentang hal itu, menandatangani dan melakukan hal-hal yang perlu.

Di samping itu dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, para juru lelang atas nama pemerintah sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk memberikan consent untuk raya piutang yang diberikan dalam pelelangan dengan jaminan hipotek atas barang tidak bergerak.

**Pasal 13b.**

(s.d.t. dg. S. 1930-85.) Dalam lingkungan pekerjaan masing-masing, Para juru lelang, atas nama pemerintah sebagai wakil Indonesia, berwenang untuk menerima barang gadai sebagai jaminan seperti yang disebut dalam alinea ketiga pasal 26 Peraturan Lelang dan melakukan hal-hal yang perlu.

**Pasal 13c.**

(s.d.t. dg. S. 1930-85.) Mengenai penerimaan barang gadai sebagaimana termaksud dalam alinea ketiga pasal 26 Peraturan Lelang, harus dibuat akta rangkap dua. Barang gadai yang diterima sebagai jaminan harus diuraikan dalam akta itu sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin tertukar.

Satu eksemplar dari akta tersebut disimpan oleh juru lelang.

Kredit tidak akan diberikan sebelum akta termaksud dibuat dan barang - barang jaminan diterima, sedangkan dalam pemberian barang gadai sebagai jaminan berupa buku tabungan dan surat-surat deposito atas nama, sebelumnya harus telah diterima suatu surat pernyataan telah menerima pemberitahuan, seperti yang dimaksud dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Pasal 14.**

Pemberian grosse pertama dari berita acara tentang pelelangan dicatat pada minut berita acara, dengan menyebutkan, bila grosse adalah kutipan dari pembelian yang bersangkutan.

**Pasal 15.**

Pada bagian bawah berita acara setiap penjualan eksekusi, juru lelang yang melaksanakan pelelangan harus mencatat apakah perlawanan termaksud dalam pasal berikut, yaitu terhadap penyerahan uang pembelian, telah diberitahukan dengan resmi atau tidak dan bila telah diberitahukan, dengan exploit mana pemberitahuan dilakukan.

**Pasal 16.**

Juru lelang wajib mengirimkan suatu petikan berita acara penjualan yang memuat kepala dan penutup berita acara, termasuk jumlah-jumlah, untuk berapa dbual dan sampai berapa berhenti penawaran, serta catatan termaksud dalam pasal yang lalu, dengan formulir E atau E-1 yang diisi tanpa surat pengantar kepada pengawas kantor lelang negeri; dalam kolom keterangan harus disebut akah akseptasi untuk rendemen bersih diminta atau tidak, dan bila diminta, sampai jumlah berapa; bila mengenai alinea keempat pasal 34 Peraturan Lelang harus disebutkan juga, berapa jumlah utang dari penjual sebagai pembeli barang gadai. Juga harus disebut di mana mereka yang berkepentingan hendak menerima akseptasi.

Pengiriman termaksud dalam alinea pertama pasal ini harus dilakukan sebagai berikut:



bila tidak ada perlawanan yang diberitahukan dengan resmi ke kantor lelang mengenai penyerahan uang pembelian, dalam 24 jam setelah penjualan berakhir, sejauh penjualan ini dilakukan di hadapanjuru lelang sendiri, dan dalam 24 jam setelahjuru lelang menerima kabar tentang berakhirnya suatu penjualan, sejauh penjualan tersebut dilakukan oleh seorang wakil juru lelang.

bila menurut ketentuan-ketentuan dalam Buku Kedua dan Keempat dari Reglemen Acara Perdata perlawanan terhadap Pembayaran uang pembelian diberitahukan dengan resmi pada kantor lelang, dalam 24 jam setelah diketahui oleh juru lelang, bahwa suatu perdamaian seperti yang dimaksud dalam pasalpasal 483, 547, dan 1011, reglemen tersebut telah terjadi, atau setelah perintah tennaksud dalam pasal 487 dan pasal 1015 reglemen tersebut diterima olehnya. Protes, surat yang menunjukkan adanya perdamaian, dan surat perintahnya, dilekatkan pada forinulir E atau E-1.

**Pasal 17.**

Juru lelang wajib berusaha, agar perhitungan yang disusun menurut Model F dan F-I tentang tagihan yang timbul dari penjualan disampaikan kepada para debitur secepat mungkin setelah penjualan berakhir, sedapat mungkin dengan buku ekspedisi.

**Pasal 18.**

Tiap pembayaran seketika dicatat dalam buku kas, dalam daftar para debitur, dan dalam daftar orang-orang yang belum melunasi utang; pembayaran termaksud dalam pasal 11, dapat dicatat dalam buku kas mengenai tiap-tiap pembahan dalam satu jumlah.

Untuk tiap-tiap pembayaran, juru lelang akan memberikan kuitansi, kecuali bila pembayar menyatakan tidak menghendaki kuitansi.

Bila utang hapus bukan karena pembayaran, hal ini dicatat dalam daftar orang-orang yang belum melunasi utang.

**Pasal 19.**

Bila seorang debitur menunggak pembayaran, ia dipindahkan ke dalam daftar orang-orang yang belum mejunasi utang dan juru lelang akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menagih utang tersebut.

Bila harta seorang debitur diurus oleh balai harta peninggalan, maka juru lelang akan mengajukan tagihan pada waktunya, dengan permintaan untuk didahulukan sejauh hal itu memungkinkan.

Penagihan kekurangan pembayaran dicatat dalam daftar orang-orang yang belum melunasi utang.

**Pasal 20.**

(s.d.u.t. dg. S. 1915-530 dan S. 1930-85.) Juru lelang menyimpan uang yang diterima dari buku tabungan dan surat-surat berharga dalam brankas atau dalam kas atau dalam peti besi yang ditanam di tanah atau tembok; bila juru lelang, dalam kedudukannya atau jabatannya yang lain, dapat menggunakan kamar penyimpanan uang, maka brankas atau peti besi itu ditempatkan dalam kamar tersebut. Di bagian atas brankas atau peti itu harus dituliskan "uang lelang", dan di dalamnya tidak boleh disimpan uang atau kertas berharga apapun selain yang diterima oleh juru lelang sebagai juru lelang.

Padahari ke-10 dan ke-20 dan hari terakhir tiap-tiap bulan, buku kas ditutup; jumlah penerimaan dalam jangka waktu yang telah ditutup bukunya oleh juru lelang pada hari-buka-kas berikutnya, bila ia tidak sekaligus mejadi penerima uang negara, harus disetor kepada penerima uang kas negara yang di daerahnya terietak kantor lelang; bersama dengan itu ia harus melampirkan daftar setoran rangkap 3 yang disusun menurut model G atau G-

1; satu eksemplar tinggal pada penerima uang negara, dua eksemplar lainnya diberi tanda terima uang dan dikembalikan oleh penerima uang negara kepada juru lelang; satu eksemplar ditinggalkan pada kantor lelang, dan yang lainnya dilampirkan pada pertanggung-jawaban triwulanan.

Bila juru lelang itu juga menjabat penerima uang negara, maka pada hari-hari yang disebut di atas ia harus memindahkan jumlah penerimaan dalam jangka waktu yang telah lampau ke kas negara; jumlah dari tiap-tiap macam penerimaan ditulis di bawah kepala (pembukuan), di mana penerimaan harus dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 2 1**

(*s.d.t. dg. S. 1930-85, S. 1940-57.*) Pada akhir tiap triwulan, dalam jangka waktu empat hari, juru lelang wajib mengirimkan pertanggungjawaban rangkap dua mengenai triwulan yang telah lewat, yang disusun menurut model H atau H- 1, kepada Menteri Keuangan tanpa surat pengantar melalui pengawas kantor letang negeri dan pejabat termaksud dalam alinea terakhir pasal 34 Peraturan Lelang.

Bersama dengan itu harus dilampirkan:

- 1<sup>o</sup>. turunan daftar pelelangan (model A atau A-1) mengenai triwulan yang dipertanggungjawabkan itu;
- 2<sup>o</sup>. daftar para debitur yang belum melunasi utangnya lebih dari 3 bulan, yang disusun menurut model J atau J-1.
- 3<sup>o</sup>. turunan daftar termaksud dalam pasal 12 alinea pertama nomor 5<sup>o</sup> sejauh mengenai jaminan-jaminan yang masih berlaku, dengan menyebut jumlah uang yang masih harus dibayar bagi tiap jaminan;
- 4<sup>o</sup>. sejauh menyangkut juru lelang kelas dua, perincian triwulanan mengenai jumlah uang pembelian, gaji lelang dan uang miskin, jumlah uang yang dibayarkan untuk mengurangi utang para debitur yang terdapat pada folio 1 dari pertanggungjawaban, juga mengenai tahun-tahun sebelum tahun yang sedang jalan, yang menjadi dasar dari perincian yang digunakan juru lelang sebagai penjelasan, dengan menyatakan apakah dalam jumlah uang yang dibukukannya dalam buku kas termasuk atau tidak uang yang telah diterima oleh juru lelang pendahulunya dari para debitur cq. dengan menyebut jumlah-jumlah uangnya.

Selain itu, pada pertanggungjawaban mengenai triwulan terakhir setiap tahun dicantumkan suatu daftar pos-pos yang terbuka pada akhir Desember dari tahun yang bersangkutan, secara terperinci mengenai Sembilan bulan pertama dan secara umum mengenai tiga bulan terakhir.

#### **Pasal 22.**

(*s.d.u. dg. S. 1940-5.*) Lembaran pertanggungjawaban yang dikirimkan kepada juru lelang, disimpan olehnya dalam arsipnya; teguran-teguran mengenai pertanggungjawaban pengawas kantor lelang negeri dari penguasa termaksud dalam ayat terakhir pasal 34 Peraturan Lelang atau dari Menteri Keuangan, harus dijawab secepatnya oleh juru lelang.

#### **Pasal 23.**

Dalam sepuluh hari setelah triwulan berakhir, kepada pejabat balik nama barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal, juru lelang wajib mengirimkan suatu keterangan mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang telah dijual, dengan menyebut tanggal pelelangan dan hal-hal lain yang berpengaruh dalam jangka waktu balik nama, mengenai penjual, pembeli, harga beli, dan kewajiban keuangan lainnya yang dipikul oleh pembeli.

#### **Pasal 24.**



(s.d.u. dg. S. 1930-85 dan S. 1940-57.) Dalam hal juru lelang mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit, hilang, cuti atau diganti untuk sementara waktu, berita acara serah terima kepada pengantinya atau pengganti sementara harus dibuat rangkap empat menurut model K, satu eksemplar untuk juru lelang yang mengundurkan diri dan satu eksemplar untuk juru lelang penggantinya; pengganti wajib mengirimkan satu eksemplar kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan satu eksemplar melalui pengawas kantor lelang negeri kepada Menteri Keuangan.

Pada tiap eksemplar berita acara harus dilampirkan satu daftar yang berisi tiap-tiap tagihan secara tersendiri, juga suatu daftar terinci yang ditandatangani oleh kedua juru lelang dan komisi dan dibuat berdasarkan daftar termaksud dalam pasal 12 alinea pertama nomor 5<sup>0</sup> mengenai apa-apa yang masih ada pada saat serah terima, yakni akta-akta dan surat-surat dengan jaminan-jaminan yang masih berlaku, buku tabungan dan surat-surat berharga lain yang digadaikan dan masih berlaku, dengan menunjukkan bukti-bukti bunga yang ada mengenai surat-surat berharga tersebut, Bila serah-terima itu mengenai kantor lelang kelas II, pada ketiga eksemplar berita acara yang dibuat menurut model K- 1, juga dilampirkan suatu perincian yang ditandatangani oleh kedua juru lelang dan komisi, yang mencantumkan (sendiri-sendiri untuk tiap triwulan timbulnya suatu tagihan yang bersangkutan dengan jumlah-jumlah yang dibayar) berapa jumlah uang pembelian, upah lelang dan uang miskin yang terdapat dalam jumlah yang disetorkan dalam triwulan terjadinya serah terima, dan dalam jumlah penerimaan setelah penyeteroran pada kas negara, sekedar mengenai satu triwulan atau lebih, yang mendahului triwulan terjadinya serah terima, belum diajukan pertanggungjawaban. Pada perincian itu, yaitu untuk setiap triwulan tersendiri, ditujukan juga jumlah-jumlah gaji lelang dan uang miskin yang termasuk dalam tiap folio I dari pertanggung-jawaban yang diajukan mengenai triwulan-triwulan sebelumnya atau pertanggung-jawaban mengenai triwulan itu, dikurangkan dari jumlah yang timbul dari debit. Berdasarkan perincian itu, oleh juru lelang yang mengundurkan diri harus diberikan suatu keterangan yang ditandatangani, yang menyatakan ada tidaknya uang yang diterimanya dari para debitur tetapi belum dibukukan dalam buku kas lelang, serta ada tidaknya uang demikian yang diterimanya dari juru lelang yang digantikannya dan dibukukan seakan-akan diterima olehnya sendiri dengan menyebutkan jumlah uangnya.

#### **Pasal 25.**

Juru lelang, sebelum memangku jabatannya, wajib bersumpah di depan kepala pemerintah daerah sebagai berikut:

"Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai juru lelang dengan saksama. Semoga Tuhan yang Maha Esa beserta saya".

Sumpah ini diangkat di depan kepala pemerintah setempat, bila hal ini untuk tiap keadaan ditentukan tersendiri-dikuasakan padanya oleh kepala pemerintah daerah.

### **JURU LELANG KELAS I**

#### **Pasal 26.**

Selain buku-buku tersebut dalam pasal 12, juru lelang wajib membuat mengenai pembayaran seperti dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang menurut model 0.

#### **Pasal 27.**

Juru lelang adalah kepala langsung dari juru tulis lelang, dari penyeru lelang, dan bila di kantor lelang tidak ada pemegang buku tersendiri, dari pegawai lain di kantor lelang.



**Pasal 28.**

Juru lelang dapat menyuruh menagih utang yang belum dibayar oleh seorang tukang lelang, tetapi wajib membayar biaya penagihan bila itu tidak dapat dibebankan kepada debitur dan ternyata bahwa juru lelang dapat mengetahui hal itu sebelumnya.

**Pasal 29.**

Juru lelang tidak berwenang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengadakan pelelangan.

**Pasal 30.**

Dalam penerimaan yang dibukukan dalam buku kas menurut pasal 18 dan disetor di kas negara menurut pasal 20, sudah termasuk denda karena pembayaran terlambat dan pembayaran termaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang.

Pembayaran tersebut terakhir dibukukan dalam buku kas pada hari terakhir tiap bulan sebagai satu jumlah.

**Pasal 31.**

(s.d.t. dg. S. 1916-584 dan S. 1930-85.) Terhadap juru lelang di kantor lelang yang mempunyai pemegang buku yang khusus, tidak berlaku ketentuan pasal-pasal 8,, 12, 13, 13a alinea kedua, 13c alinea ketiga, 14-23, 26, 28, dan 30; pada penggantian juru lelang tidak perlu dibuat berita acara termaksud dalam pasal 24. Juru lelang berhak melihat semua daftar dan surat dari arsip kantor; segera setelah selesai lelang, ia wajib menyampaikan berita acara yang dibuat kepada pemegang buku.

**JURU LELANG KELAS II****Pasal 32.**

(s.d.u.t. dg. S. 1910-468, S. 1914-684, S. 1917-263 dan 599, dan terakhir dg. S. 1940-57.) Di dalam daerahnya di luar tempat kedudukannya, juru lelang, atas biayanya dan tanggung jawabnya, boleh mengadakan pelelangan yang diwakilkan kepada orang yang diberi kuasa dengan persetujuan pengawas kantor lelang negeri.

**Pasal 33.**

Juru lelang mengangkat pegawai yang diperlukan, menggaji dan memberhentikannya.

**Pasal 34.**

(s.d.u.t. dg. S. 1929-492.) Dalam penerimaan yang menurut pasal 18 dibukukan dalam buku kas dan menurut pasal 20 disetor ke kas negara, juga termasuk denda karena pembayaran terlambat. Pembayaran termaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 Peraturan Lelang tidak boleh dibukukan dalam buku kas dan tidak boleh disetor ke kas negara. Kepala Pemerintahan Daerah dapat mengizinkan, bahwa penyeteroran pada kas negara oleh juru lelang, yang di tempat kedudukannya tidak ada kas negara, dilakukan dalam jangka waktu antara yang lebih panjang daripada yang ditu dalam pasal 20.

**Pasal 35.**

Dalam penagihan utang lelang, juru lelang yang masih dalam jabatannya pada waktu penagihan, bertindak atas nama pemerintah. Bila penagihan, sejauh tidak dapat dibebankan kepada debitur, dibebankan kepada juru lelang, dan bila pelelangan dilaksanakan oleh orang lain

daripada orang yang metakukan penagihan dibebankan kepada kedua orang itu, masingmasing separuh.

Bila lelang dilakukan oleh juru lelang lain daripada juru lelang yang menagih utang, maka atas permintaan dan untuk kepentingan juru lelang tersebut terakhir, bagian yang telah dibayarnya lebih dahulu untuk juru lelang sebelumnya harus dikurangkan dari jumlah yang akan diterima oleh juru lelang sebelumnya itu, yang terdapat pada kas negara, berupa gaji lelang dan ganti rugi atas pelelangan yang diminta tetapi tidak jadi dilangsungkan.

**Pasal 36.**

Bila menurut pendapatnya kepentingan negara memerlukan, kepala Pemerintah Daerah dapat menagih utang lelang atas nama pemerintah.

Biaya penagihan, sejauh tidak dapat dibebankan kepada debitur, dibebankan kepada juru lelang atau kepada para juru lelang yang harus melakukan penagihan atas biaya sendiri berdasarkan asas pasal yang lain. Untuk menuntut biaya penagihan, kepala daerah dapat menggunakan bagian upah lelang yang ada pada kas negara dan ganti rugi karena pelelangan dimohon tetapi tidak jadi dilaksanakan, yang akan diterima oleh juru lelang atau para juru lelang.

**Pasal 37.**

Semua buku tata usaha harus diserahkan oleh juru lelang pada akhir jabatannya kepada penggantinya.

**Pasal 38.**

Juru lelang harus mengadakan tata usaha tersendiri mengenai lelang, yang dilakukan selama pengurusannya, dan yang dilakukan oleh juru lelang sebelumnya; mengenai tiap tata usaha, ia harus membuat suatu pertanggung-jawaban triwulan.

Mengenai tata usaha yang dilakukan harus diadakan perhitungan triwulanan menurut model P.

**Pasal 39.**

(s.d.t. dg. S. 1910-258jo. S.K. Menteri Keuangan No. 10012 L tanggal 22 Mej 1951.) Juru lelang, selain menikmati apa yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini dan upah lelang dari lelang yang dilakukan selama dalam pengurusannya, juga mendapat ganti rugi mengenai lelang yang dimohon untuk dilaksanakan, tetapi tidak jadi dilaksanakan, sebanyak tiga perlimanya. Dalam hal tagihan yang timbul dari pelelangan dan diterima oleh juru lelang lain daripada yang melakukan lelang, kecuali yang dimaksud pada alinea keempat, keduanya menikmati upah lelang yang terdapat dalam jumlah yang diterima masing-masing tiga persepuluh.

Ketentuan-ketentuan alinea di atas tidak berlaku:

- a. mengenai upah lelang yang terdapat dalam tagihan yang uangnya telah disetor ke kas negara dan dibukukan dalam buku kas lelang oleh juru lelang lain daripada juru lelang yang menerimanya dari debitur, dengan pengertian bahwa bila juru lelang yang menerima uang dan yang membukukan itu lain daripada juru lelang yang melakukan lelang, maka juru lelang tersebut terakhir ini menerima tiga persepuluh dari upah lelang termaksud;
- b. mengenai upah lelang yang terdapat dalam tagihan yang timbul dari pemberian kredit yang bertentangan dengan ketentuan alinea keempat dan kelima pasal 22 Peraturan Lelang di Indonesia, sejauh mengenai bagian dari gaji juru lelang yang melakukan pelelangan.

Kepala-kepala kantor lelang kelas II yang diangkat dalam daerah yang ditetapkan menurut keputusan Menteri Keuangan berhak menerima upah lelang



2/5 dari jumlah bea lelang dari lelang-lelang yang telah diadakannya, dan dari ganti rugi pembatalan permintaan lelang, yang diterimanya mengenai tata usahanya.

**Pasal 40.**

(s.d.u. dg. S. 1912-584.) Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam alinea ketiga pasal 35 dan alinea kedua pasal 36, kepada juru lelang atau bekas juru lelang harus diberikan bagiannya dalam upah lelang dari pelelangan yang diadakan dalam satu triwulan dan dalam ganti rugi dari pelelangan yang dimohon dalam triwulan itu tetapi tidak jadi dilakukan pada permulaan tliwulan kedua yang berikut.

Bila dari pelelangan atau pelelangan sebelumnya dilakukan olehnya masih ada utang lelang yang belum dilunasi, maka jumlah yang diberikan harus dikurangi dengan utang yang belum terbayar. Tergantung pada pelunasan utang lelang, jumlah yang ditahan akan dibayarkan pada permulaan triwulan setelah utang dilunasi.

Dalam hal termaksud pada alinea kedua yang lain, bayaran kepada bekas juru lelang dan penggarttinya diberikan menurut jumlah bagiannya.

(s.d.u. dg. S. 1929-492.) Upah persepsi termaksud dalam pasal 45 Peraturan Lelang, dibayar kepada yang berkepentingan secepat mungkin setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

**PEMEGANG BUKU**

**Pasal 41.**

Pemegang buku adalah kepala langsung para pegawai yang khusus diperbantukan kepadanya.

**Pasal 42.**

(s.d.u.t. dg. S. 1916-584 dan S. 1930-85.) Bagi pemegang buku berlaku ketentuan-ketentuan pasal-pasal 8, 12 alinea pertama noior-nomor 11, 21, 41 dan 51, pasal 13, 13a alinea kedua, 13c alinea ketiga, 14, 15, 16, 17, 19, 21 alinea kedua dan ketiga, 23, 26, dan 28.

Selain membuat daftar-daftar tersebut dalam pasal 12, ia harus mengadakan suatu rekening koran dengan semua debitur kantor, dengan maksud agar ia dapat memberitahukan kepada para juru lelang, bila diperlukan, berapa kredit yang diberikan kepada masing-masing pada saat tertentu. Ia wajib memberitahukan kepada para juru lelang siapa-siapa yang diberi kredit melebihi seperdua dari maksimum yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Lelang.

**Pasal 43.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pemegang buku dan ajung pemegang buku (pembantu pemegang buku) mempunyai wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab terhadap pelelangan yang dilakukannya sama seperti juru lelang.

**Pasal 44.**

Pemegang buku bertugas mengurus keperluan lokal dan biro.

**Pasal 45.**

Kepada para juru lelang ia wajib memberi keterangan-keterangan, bila diperlukan, mengenai pengurusan kantor.

(s.d.t. dg. S. 1929-492.) Persentase termaksud dalam alinea ketiga pasal 45 Peraturan Lelang adalah 0,5%.

**Pasal 46.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pemegang buku wajib menaati ketentuan-ketentuan



pasal-pasal 12 alinea pertama nomor 31, 18., 20, 21 alinea pertama, 22, 24, dan 30.

**Pasal 47.**

Dihapus dengan S. 1940-57.

**Pasal 48.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pemegang buku, juga ajung pemegang buku, sebelum memangku jabatan, harus bersumpah di depan kepala Pemerintah Daerah di tempat tugas masing-masing sbb.: "Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban sebagai pemegang buku (pembantu pemegang buku) dengan saksama, semoga Tuhan yang Maha Esa beserta saya".

49, 50, 51, 52 (Tentang kasir; dihapus dengan S. 1940-57.)

**CAMPUR TANGAN PEJABAT TERMAKSUD DALAM A L I N E A PENUTUP PASAL 34  
PERATURAN LELANG (s.d.u. dg. S. 1940-57.)**

**Pasal 53.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Surat-surat termaksud dalam pasal 21 dan pasal 24 dikirimkan kepada Menteri Keuangan oleh pejabat termaksud dalam alinea penutup pasal 34 Peraturan Lelang setelah digunakan seperlunya; demikian pula pertanggungjawaban triwulanan setelah diisi dengan utang-utang yang bersangkutan dengan tata usaha lelang. Pada pertanggungjawaban mengenai triwulan terakhir dari tiap tahun, harus dilampirkannya daftar utang-utang dari tata usaha lelang, yang terbuka pada akhir Desember.

**Pasal 54.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Selekasnya setelah menerima kutipan berita acara suatu pelelangan bersama dengan formulir E atau E- I termaksud dalam pasal 16, pejabat termaksud dalam pasal 34 Peraturan Lelang harus membuat akseptasi yang diperlukan dan menyerahkannya kepada orang yang berkepentingan dengan perantaraan juru lelang atau pemegang buku, bila ada yang bertugas di situ, atau penguasa setempat di tempat orang yang berkepentingan ingin menerimanya. Bila tidak dikeluarkan akseptasi, maka setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal 34 Peraturan lelang, kepada yang berhak atau wakilnya yang sah atas permintaannya, harus diberikan mandat termaksud dalam alinea tersebut. Pada kepala akseptasi harus ditulis "AKSEPTASI LELANG" dengan huruf yang mencolok. Pada duplikat akseptasi atau mandat harus dilekatkan kutipan berita acara lelang.

**Pasal 55.**

(s.d.u. dg. S. 1940-57.) Pejabat termaksud dalam pasal 34 Peraturan Lelang wajib mengumpulkan formulir E dan E-1 yang dikirimkan kepadanya; di atasnya ia harus mencatat akseptasi-akseptasi mana yang dikeluarkan olehnya; rendemen yang atasnya tidak dikeluarkan akseptasi, dinyatakan dapat dibayar.

**Pasal 56.**

Ia wajib mengadakan:

- 1<sup>o</sup>. untuk tata usaha lelang, masing-masing suatu daftar rendemen menurut model L;

- 2<sup>0</sup>. untuk juru lelang kelas II, masing-masing suatu perhitungan triwulanan mengenai upah yang terutang kepada juru lelang menurut model M; mengenai upah penggantinya tidak perlu diadakan perhitungan tersendiri;
- 3<sup>0</sup>. untuk tiap kantor lelang kelas II di mana ia bukan sebagai pengawas kantor lelang negeri, perhitungan triwulan yang disusun menurut model P.

**Pasal 57.**

(s.d.u.t. dg. S. 1929-492 dan S. 1940-57.) Setelah berakhir suatu triwulan, pejabat termaksud dalam pasal 34 Peraturan Lelang, wajib menyerahkan;

- 1<sup>0</sup>. atas beban rekening pihak ketiga (rekening dengan para juru lelang), suatu mandat atas nama masing-masing juru lelang yang bersangkutan untuk jumlah yang dibayarkan seperti dimaksud dalam pasal 40, kecuali upah persepsi;
- 2<sup>0</sup>. atas beban rekening pihak ketiga (dana lelang), suatu mandat atas nama penerima uang negara yang bersangkutan, untuk rendemen murni yang dapat ditagih menurut pasal 34 Peraturan Lelang atas rekening negara, dengan diterima kembali di bawah kepala, di mana rendemen itu seharusnya dipertanggungjawabkan;
- 3<sup>0</sup>. atas beban pasal anggaran belanja negara yang bersangkutan, suatu mandat atas nama tiap juru lelang yang bersangkutan, untuk pembayaran upah persepsi termaksud dalam pasal 45 Peraturan Lelang.

58. Dihapus dg. S. 1940-57.

**INSPEKTUR DAN PEMBANTU INSPEKTUR KEUANGAN**

**Pasal 59.**

Di bawah pengawasan inspektur dan pembantu inspektur keuangan termasuk juga pengawasan atas daftar dan rekening-rekening termaksud dalam pasal 56.

**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**Pasal 60.**

(s.d.t. dg. S. 1916-584.) Instruksi ini mulai berlaku bersama dengan Ordonansi 28 Februari 1908 (S. 1908-189) dan dapat disebut "Instruksi Lelang".

61. Dihapus dg. S. 1940-57.

62. Dihapus dg. S. 1940-57.